

MAKASSAR

Kota Dunia yang **Krisis Air**

2024





Makassar

Kota Dunia yang Krisis Air

Penulis:

Slamet Riadi
Hikmawaty Sabar
Altriara Pramana Putra Basri

Layouter:

Fitrah Yusri

Diterbitkan oleh:

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan
Jalan Aroepala, Kompleks Permata Hijau Lestari, Blok Q1 No.8, Makassar Indonesia
+628229 393 9591
+62411 467 1368
walhisulsel@gmail.com
www.walhisulsel.or.id

Both ENDS
Nobelstraat 4
3512 EN Utrecht
The Netherlands
info@bothends.org

September, 2024



MAKASSAR

Kota Dunia yang Krisis Air



TALLO
KERING
PDAM
HENING

KAMI
BUTUH
AIR
BUKAN
JANJI

KRISIS
AIR
ADALAH
MAUT

STOP
PRIVATISASI
DAN KOMERSIALISASI
AIR BERSIH

MAKASSAR
KOTA DUNIA
MAKASSAR
KRISIS AIR

AIR
HAK ASASI
BUKAN
KOMODITI





Daftar Isi

Pernyataan & Tuntutan Perempuan di Kecamatan Tallo

Daftar Isi	I
Ringkasan Eksekutif	iii
Rekomendasi Kebijakan	v
Metode dan Etika Penelitian	vii
Bagian I	
<i>Kota Dunia yang Rapuh</i>	1
A. Lonjakan Industrialisasi dan Minimnya Ruang Terbuka Hijau	2
B. Hidrologi Kota Makassar dan Pengaruh Daerah Aliran Sungai yang Kritis	4
Bagian II	
<i>Krisis Air di Tengah Krisis Iklim:</i>	
Kesaksian Warga Kota atas Permasalahan Air Bersih di Makassar	10
A. Hasil Jajak Pendapat Warga Kota Makassar terkait Pelayanan Air Bersih	11
B. Hasil Jajak Pendapat Warga Kecamatan Tallo atas Krisis Air yang Mereka Alami.....	14
Bagian III	
<i>Darurat air di pesisir utara kota makassar</i>	18
A. Cerita dari Tiga Kampung Pesisir Makassar	18
B. Kelangkaan Air Bersih dan Dampaknya terhadap Perempuan di Kecamatan Tallo	38
C. Privatisasi Air dan Pengabaian Negara terhadap Pemenuhan Hak atas Air bagi Warga di Kecamatan Tallo	47
Kesimpulan	54
Daftar Pustaka	57
Galeri Perjuangan Perempuan Pesisir Utara Kota Makassar	59

An aerial photograph of a coastal city, likely Makassar, showing a large port area with several ships and a dense residential area with many small houses. The image is dark and has a blue tint.

Potret Pesisir Utara Kota Makassar
yang Mengalami Krisis Air Di tengah Massifnya Pembangunan
Reklamasi Makassar New Port



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan penelitian yang berjudul *'Makassar: Kota Dunia yang Krisis Air'* merupakan upaya WALHI Sulawesi Selatan dalam membongkar dan memahami lebih dalam terkait dengan permasalahan krisis air yang dialami oleh warga yang ada di Kecamatan Tallo. Kurang lebih 20 tahun lamanya, masyarakat yang berada di Kecamatan Tallo khususnya di Kelurahan Tallo, Kaluku Bodoa, dan Buloa merasakan kelangkaan air bersih. Permasalahan ini semakin diperparah dengan adanya pengaruh perubahan iklim yang semakin hari semakin dirasakan oleh semua orang. Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih empat bulan di tiga kelurahan berbeda yakni di Kelurahan Tallo, Buloa, dan Kaluku Bodoa. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang bersumber dari hasil observasi lapangan, wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, penyebaran kuesioner (offline/online), dan analisa spasial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Makassar yang seringkali digambarkan sebagai 'Kota Dunia' ternyata begitu rapuh sebagai akibat dari lonjakan industrialisasi, minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan dipengaruhi oleh Daerah Aliran Sungai (DAS) yang kritis. Kerapuhan itulah yang kemudian semakin diperparah dengan krisis iklim yang saat ini terjadi. Dari 78 responden yang mengisi kuesioner secara online mengutarakan bahwa permasalahan air bersih yang mereka alami yakni: PDAM yang tidak mengalir (27%), Air bersih yang sulit (23%), Sumber Air Jauh (11%), Air yang harus dibeli (22%), dan Kualitas air yang kurang baik (17%). Sementara dari 86 responden di tiga kelurahan yang mengisi kuesioner secara offline menggambarkan bahwa di Kelurahan Tallo mengeluhkan soal 'Air PDAM yang tidak Mengalir', Kelurahan Buloa mengeluhkan soal 'Pemerintah yang Tidak Pernah Mendengar Keluhan Air Bersih Warga', dan Kelurahan Kaluku Bodoa yang mengeluhkan soal 'Air Berbau, Asin, dan Berwarna'.

Tidak hanya itu, penelitian ini juga menemukan bahwa permasalahan krisis air yang dialami oleh masyarakat yang tinggal di pesisir utara Kota Makassar memberi dampak terhadap perempuan baik secara ekonomi, sosial, dan kesehatan. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan adanya bentuk privatisasi air dalam hal monopoli distribusi air PDAM yang dijual kembali ke masyarakat dan ketimpangan atas akses air bersih. Dimana data menunjukkan bahwa Makassar Utara dengan jumlah pelanggan dan industri yang cukup banyak ternyata justru menerima air dari PDAM Kota Makassar dengan jumlah yang sedikit. Kondisi tersebut sangat berbeda dengan beberapa kecamatan yang masuk dalam wilayah Makassar Barat dimana jumlah pelanggan sedikit dengan jumlah industri yang besar tapi volume air yang disalurkan sangatlah fantastis.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Saat ini sekitar 90% bencana iklim berhubungan dengan air. Negara-negara berpendapatan rendah dan menengah adalah pihak yang paling dirugikan dalam menghadapi bencana iklim ini. Mengingat kerentanan yang ada di berbagai bidang seperti pangan, air, kesehatan, dan infrastruktur, membuat negara-negara tersebut semakin terpuruk, termasuk Indonesia. Dalam ketidakadilan yang lebih mendalam, komunitas-komunitas ini juga

merupakan kelompok yang memberikan kontribusi paling kecil terhadap perubahan iklim tapi justru menjadi kelompok paling rentan terdampak akibat krisis iklim. Olehnya itu, berdasarkan dari temuan penelitian yang didapatkan maka WALHI Sulawesi Selatan kemudian merekomendasikan beberapa hal untuk para stakeholder atau pemangku kepentingan terkait dengan permasalahan krisis air yang dialami oleh masyarakat yang ada di Kecamatan Tallo sebagai berikut:

- 1. Memperluas Ruang Terbuka Hijau (RTH).** Pemerintah Kota Makassar harus menyediakan lahan atau alokasi RTH dalam rangka menambah wilayah resapan air yang dimana kondisinya saat ini semakin menyempit akibat meningkatnya pembangunan dan industrialisasi di Kota Makassar.
- 2. Merawat dan Menjaga Daerah Aliran Sungai (DAS).** Secara hidrologi, Kota Makassar sebagai wilayah hilir mendapatkan pengaruh yang besar dari wilayah hulu DAS yang kritis yakni DAS Jeneberang, DAS Tallo, dan DAS Maros. Akibatnya, saat musim penghujan kota ini akan mendapatkan kiriman air dari hulu yang menjadi salah satu

penyebab banjir dan saat musim kemarau akan mengganggu sumber air minum warga kota yang dikelola oleh PDAM. Maka dari itu, Pemerintah Kota Makassar harus mengajak pemerintah daerah lain (Gowa, Maros, dan Takalar) untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini.

- 3. Menerapkan Pajak 'Progresif' Penggunaan Air Tanah dan Air Permukaan bagi Industri skala Besar.** Saat ini, penggunaan air tanah dan air permukaan di Kota Makassar banyak digunakan oleh industri-industri besar. Bahkan penggunaannya pun tidak terkontrol. Oleh karena itu, pemerintah perlu membenahi permasalahan ini agar cadangan air tanah di Kota Makassar tidak mengalami kelangkaan akibat penggunaannya yang tidak terkontrol.
- 4. Memperbaiki Pelayanan, Tata Kelola, dan Distribusi Air Bersih.** Dari hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa sebenarnya permasalahan air bersih di Kecamatan Tallo bukan persoalan teknis 'perpipaan', melainkan masalah akses dan distribusi. Hal ini dikarenakan sebagian kecil warga ada yang mendapatkan akses atas air bersih dari PDAM sementara sisanya harus membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.
- 5. Membuat Dokumen Perencanaan Adaptasi dan Mitigasi dalam Menghadapi Krisis Air dan Perubahan Iklim.** Selain melakukan perbaikan teknis, Pemerintah Kota Makassar juga harus menyiapkan dokumen perencanaan adaptasi dan mitigasi bagi warga kota yang masih sulit mengakses air bersih di tengah krisis iklim yang saat ini telah dirasakan oleh semua orang.



Sungai Tallo yang Berseblahan dengan Kampung Pesisir yang Mengalami Krisis Air

METODE DAN ETIKA PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis riset berbasis advokasi yang dimana didesain khusus untuk mengubah atau memperbaiki suatu kebijakan. Sehingga, keluaran dari penelitian ini nantinya akan menghasilkan dua dokumen penting yakni laporan hasil riset dan kertas kebijakan (policy brief). Dimana kedua dokumen ini nantinya akan dijadikan sebagai bahan advokasi ke stakeholder terkait agar permasalahan krisis air bersih yang dialami oleh masyarakat di Kecamatan Tallo dapat teratasi atau paling tidak pemerintah segera memperbaiki tata kelola distribusi air bersih di Kota Makassar.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Mixed Method Research dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif secara bersamaan. Secara lebih terperinci, penelitian ini menggunakan dua jenis data (primer-sekunder) dengan metode pengumpulan data sebagai berikut; (1) Observasi-Partisipasi; (2) Wawancara Mendalam; (3) Focus Group Discussion (FGD); (4) Penyebaran Kuesioner (offline-online); (5) Analisis Spasial; dan (6) Studi pustaka.

Terakhir, secara keseluruhan, penelitian ini berlangsung selama kurang lebih empat bulan (April sampai dengan Juli 2024) dan berlokasi di tiga kelurahan di Kecamatan Tallo yakni Kampung Galangan Kapal di Kelurahan Kaluku Bodoa. Kampung Buloa di Kelurahan Buloa, dan Kampung Makam Raja-Raja Tallo di Kelurahan Tallo.





“

Makassar
Kota Dunia
yang Krisis
Air

”





Salah satu Mural di Sudut Perkampungan Tallo yang Menggambarkan Krisis Air ditengah Pandemi Covid 19

BAGIAN I

Kota dunia yang rapuh

Pemerintah Kota menetapkan Kota Makassar tanggap darurat bencana kekeringan. Sebanyak 89.998 jiwa dari 26.998 kepala keluarga yang terdampak krisis air bersih akibat kekeringan tersebar di 8 Kecamatan dari 15 Kecamatan yang ada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, setiap harinya menargetkan suplai air bersih sebanyak 125 ribu hingga 150 ribu liter air bersih kepada ribuan warga terdampak dengan asumsi 20 liter per jiwa di 322 titik lokasi penyaluran.

(Metrotvnews.com, 20 September 2023)

Tahun lalu, ribuan warga Kota Makassar terdampak kekeringan ekstrim. Hal ini dipicu oleh fenomena El Nino dan memburuknya daya dukung serta daya tampung lingkungan Kota Makassar dari tahun ke tahun. Kota yang seringkali dinarasikan oleh pemerintah sebagai 'Kota Dunia' nyatanya begitu rapuh menghadapi ancaman krisis iklim. Berdasarkan catatan WALHI Sulawesi Selatan (2024), Ada dua faktor dominan yang membuat kota ini memiliki kemampuan resiliensi yang rendah utamanya ketika dihadapkan dengan masalah perubahan iklim yakni (1) lonjakan industrialisasi dan minimnya ruang terbuka hijau dan (2) Sistem Hidrologi Kota dan Pengaruh Daerah Aliran Sungai yang kritis.

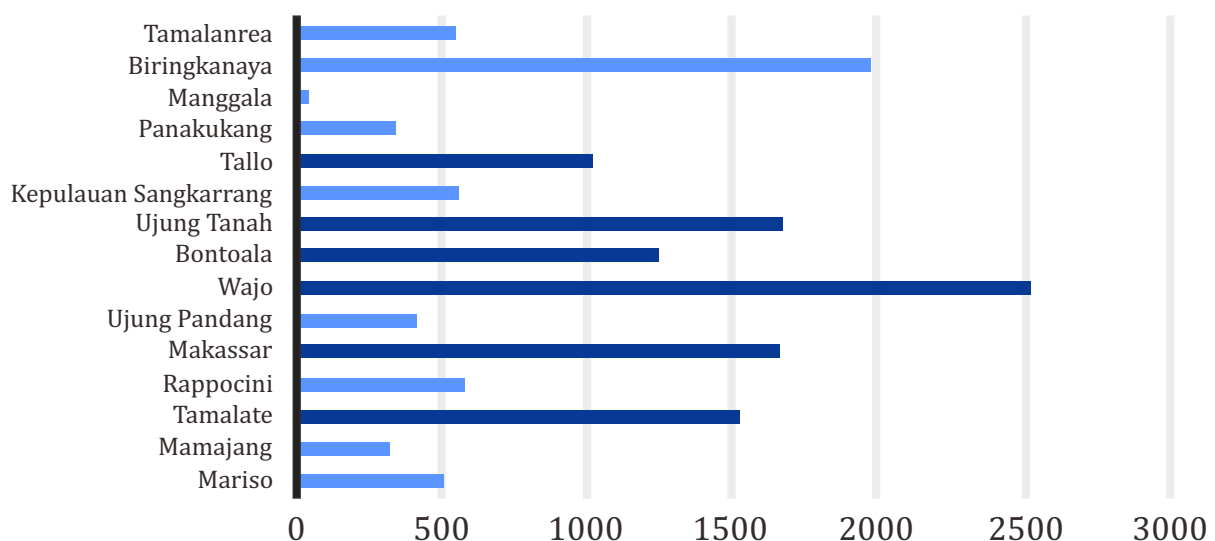


Lonjakan Industrialisasi dan Minimnya Ruang Terbuka Hijau

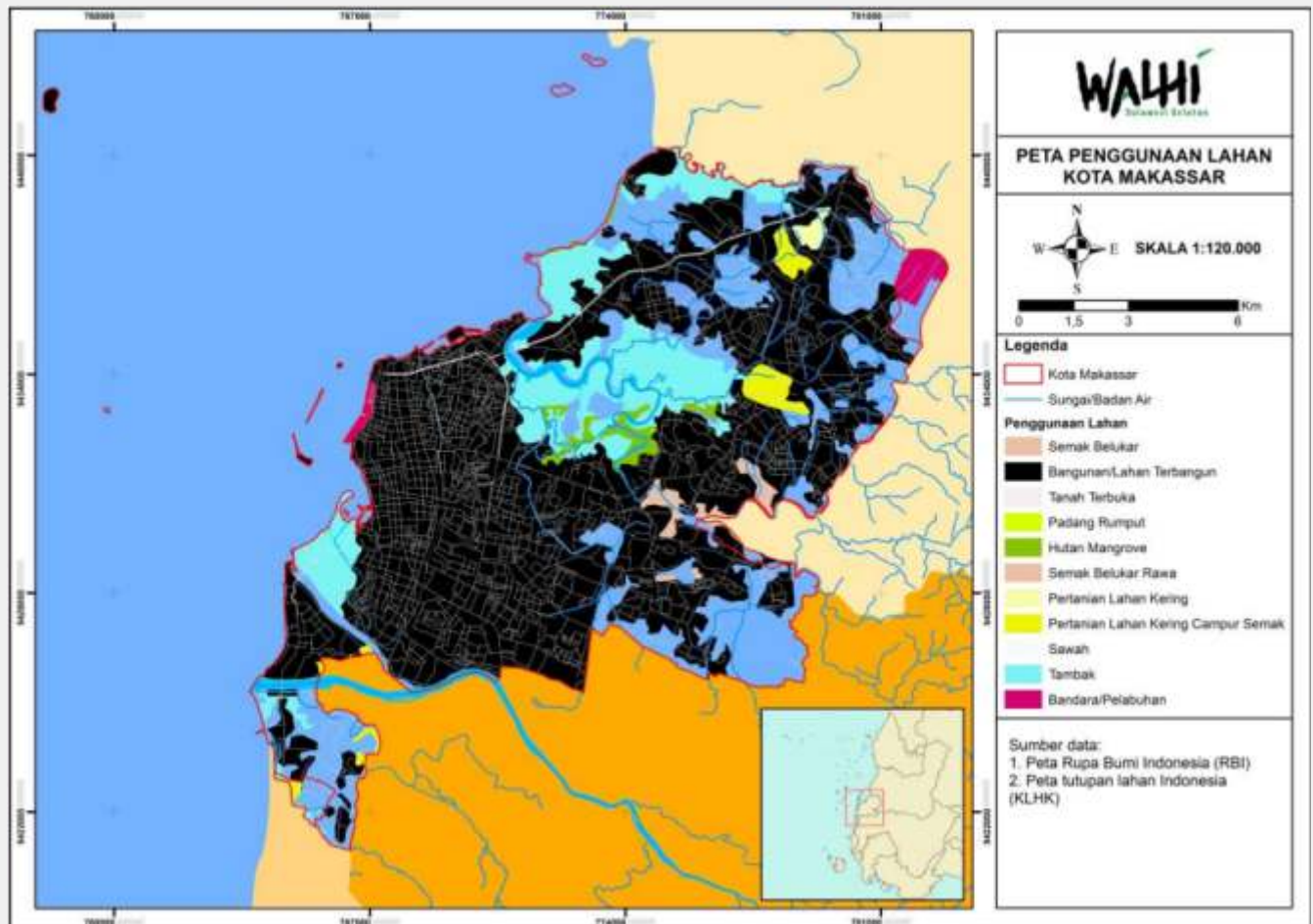
Secara keruangan, WALHI Sulawesi Selatan mencatat bahwa saat ini lahan terbangun di Kota Makassar berkisar 11.432 Ha atau 65,04 % dari luas kota. Tingginya angka lahan terbangun di Kota Makassar sejatinya tidak diimbangi dengan penyediaan atau penambahan RTH dan daerah resapan air yang memadai. Terbaru, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar mengklaim bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Makassar mengalami peningkatan yang sampai saat ini angkanya berada pada 11,47%. Angka pertambahan RTH Kota Makassar ini didasari dari hasil perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang dilakukan oleh pemerintah (RakyatSulsel.co, 2024). Persentase luasan tutupan RTH Kota Makassar ini tentu masih sangat jauh dari angka minimum yakni 30% dari luas kota.

Meskipun beban pembangunan di Kota Makassar sudah begitu sangat tinggi seperti tergambar pada peta di bawah. Namun, Pemerintah Kota Makassar masih saja terus membuka ruang pengkaplingan lahan-lahan yang masih tersisa untuk diberikan kepada pengusaha bisnis properti dan industri yang tumbuh menjamur di Makassar. Akibatnya, wilayah resapan semakin menyempit dan cadangan air tanah Kota Makassar semakin menipis. Saat ini, tercatat ada kurang lebih 14.904 industri mulai dari skala kecil hingga besar yang tersebar di berbagai kecamatan di Kota Makassar. Adapun kecamatan yang paling dominan sebaran industrinya yakni Kecamatan Wajo, Biringkanaya, Bontoala, Ujung Tanah, Tallo, Makassar, dan Tamalate (BPS Kota Makassar, 2024).

Sebaran Industri di Berbagai Kecamatan di Kota Makassar

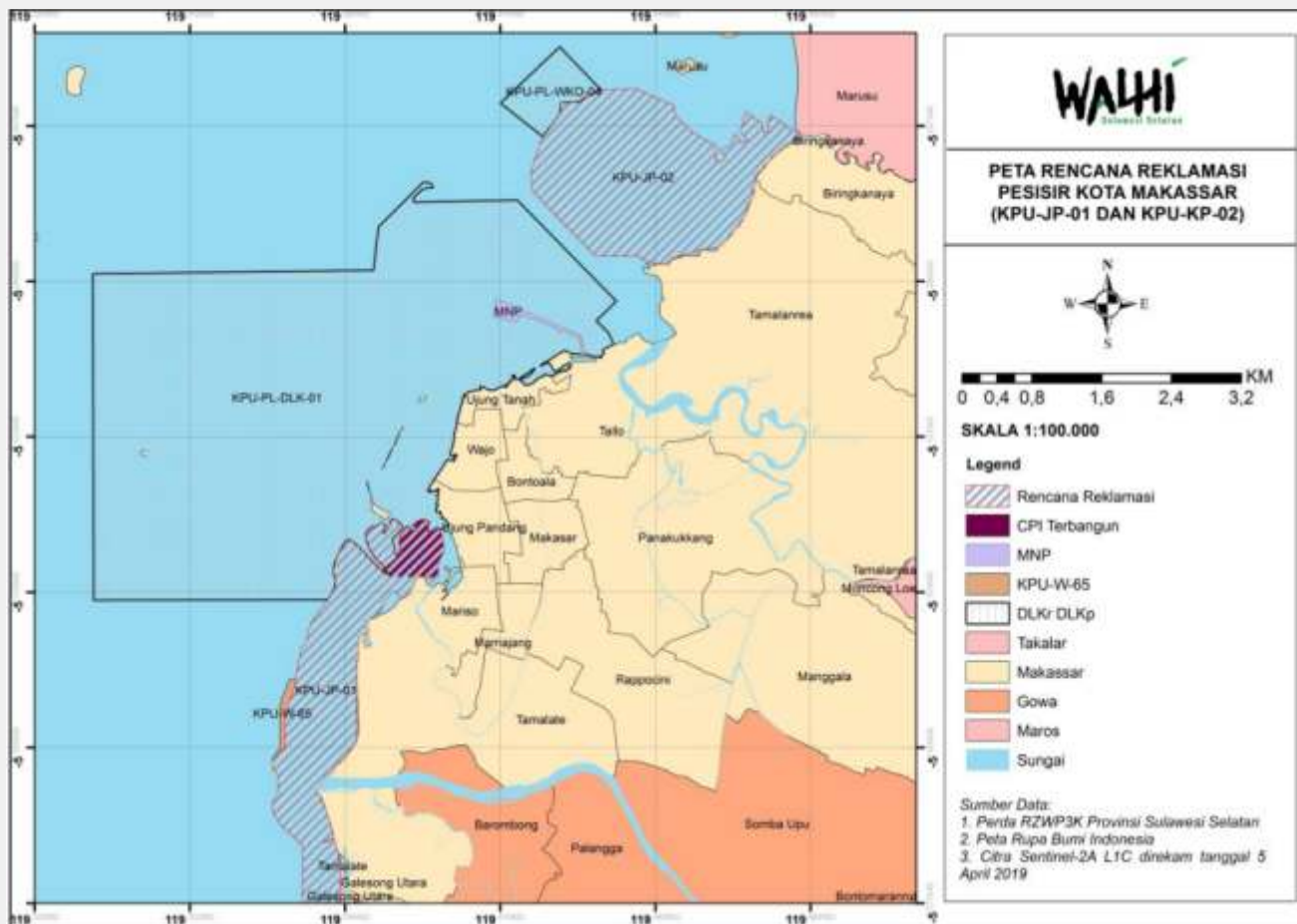


Persentase Sebaran Industri di tiap Kecamatan di Kota Makassar



Peta penggunaan lahan Kota Makassar. Secara historis, lonjakan pembangunan dan industri yang tumbuh pesat di Kota Makassar dimulai dari rezim orde baru yang ditandai dengan banyaknya bangunan baru, penataan fisik, dan pembuatan satelit-satelit kota baru yang tumbuh pesat (Makkello, 2018). Walikota pada masa itu, H.M. Dg Patempo, menetapkan rencana 'Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Makassar 1965-1970' yang dikenal sebagai program pemberantasan 3K (kemiskinan, kemelantaran, dan kebodohan). Sasaran jangka panjang dari proyek ini adalah mewujudkan Kota Makassar sebagai kota lima dimensi (kota dagang, kota budaya, kota industri, kota akademi, dan kota pariwisata) yang dampaknya dirasakan sampai sekarang.

Selain lonjakan industrialisasi, tren pembangunan di sepanjang pesisir Kota Makassar dalam bentuk 'reklamasi' juga semakin tumbuh pesat dengan dua coraknya yakni Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Bisnis Terpadu dan pengembangan Anjungan Untia. Dimana corak pembangunan gaya baru ini mendorong terjadinya perubahan pola struktur dan infrastruktur kota di sepanjang pesisir Makassar. Dimana hal ini mengakibatkan menjamurnya pembangunan kota-kota kecil di sepanjang pesisir barat Kota Makassar dan jelas menambah beban muka tanah. Bahkan, hasil penelitian Alimuddin, Bayuaji, Sumantyo, dan Kuze (2010) telah menghitung bahwa Kota Makassar telah mengalami penurunan muka tanah sekitar 10-15 cm pada periode 1993-1998 akibat dari beban bangunan di atas permukaan tanah di Makassar.



Peta Rencana Reklamasi Pesisir Kota Makassar. Berdasarkan dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Sulawesi Selatan tahun 2019 yang telah berganti menjadi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Terintegrasi Sulawesi Selatan tahun 2022 mencatat ada kurang lebih 2.706,86 Ha (72,93 % dari luas rencana reklamasi di Sulawesi Selatan).

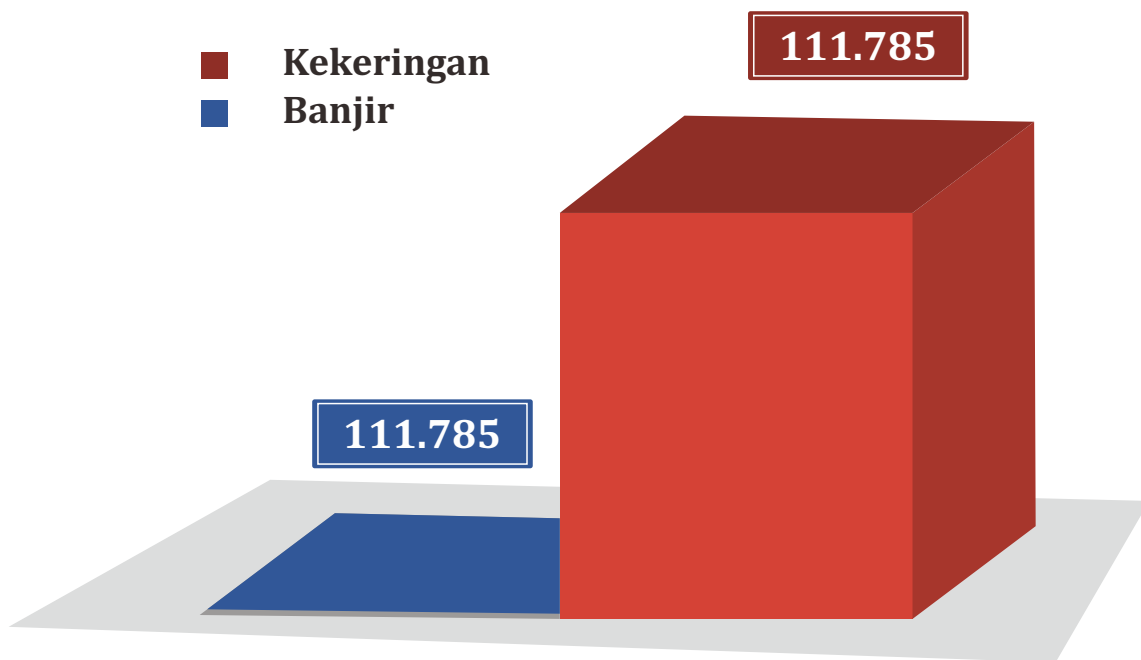
B Hidrologi Kota Makassar dan Pengaruh Daerah Aliran Sungai yang Kritis

Dari tahun ke tahun, Kota Makassar semakin menunjukkan kerentanan yang tinggi ketika menghadapi bencana hidrometeorologi. Bahkan, ketika saat musim penghujan, kota ini akan mengalami banjir dan ketika kemarau akan mengalami kekeringan. Secara ekosistem, kerentanan Kota Makassar dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim sedikit banyaknya dipengaruhi oleh tiga Daerah Aliran Sungai di sekitarnya yakni DAS Jeneberang, DAS Tallo, dan DAS Maros. Dimana ketiga DAS ini memiliki peranan dalam sistem hidrologi Kota Makassar seperti pengaruh limpasan air dari hulu ketika musim penghujan dan sumber air minum warga kota yang bersumber dari Bendungan Bili-Bili di Kabupaten Gowa dan Bendungan Lekopancing di Kabupaten Maros.

Tahun lalu, ketiga DAS ini secara signifikan mempengaruhi dua bencana ekologis yang dialami oleh

warga Kota Makassar yakni banjir dan kekeringan. Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik Kota Makassar (2024) mencatat bahwa kota ini mengalami 63 angka kejadian bencana khusus banjir dan kekeringan di tahun 2023. Bahkan, BNPB mencatat ada sekitar 113.969 jiwa yang terdampak bencana di Kota Makassar pada tahun 2023 dengan rincian 2.184 penduduk yang terdampak bencana banjir dan 111.785 warga terdampak bencana kekeringan (BNPB, 2024).

Jumlah Penduduk yang Terdampak Bencana Tahun 2023



Persentase jumlah penduduk Kota Makassar yang terdampak bencana banjir dan kekeringan pada tahun 2023. Banjir Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) di tahun 2023 ini tercatat sebagai bencana banjir terparah di Kota Makassar dan sekitarnya, dalam 40 tahun terakhir. Sedangkan untuk bencana kekeringan, Kota Makassar dilanda krisis air bersih. Di mana, air PDAM tidak lagi mengalir di 10 Kecamatan yang disebabkan Bendungan Lekopancing di Kabupaten Maros kering. Dari pantauan di lapangan, kondisi Bendungan Lekopancing di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros yang menjadi tempat penampungan air baku PDAM Makassar dalam kondisi kering. Sungai-sungai yang mengalir di Bendungan Lekopancing dari berbagai aliran mulai dari pegunungan Tompobulu dan aliran air dari Sungai Jeneberang juga terlihat kering (Kompas.com, 2023).

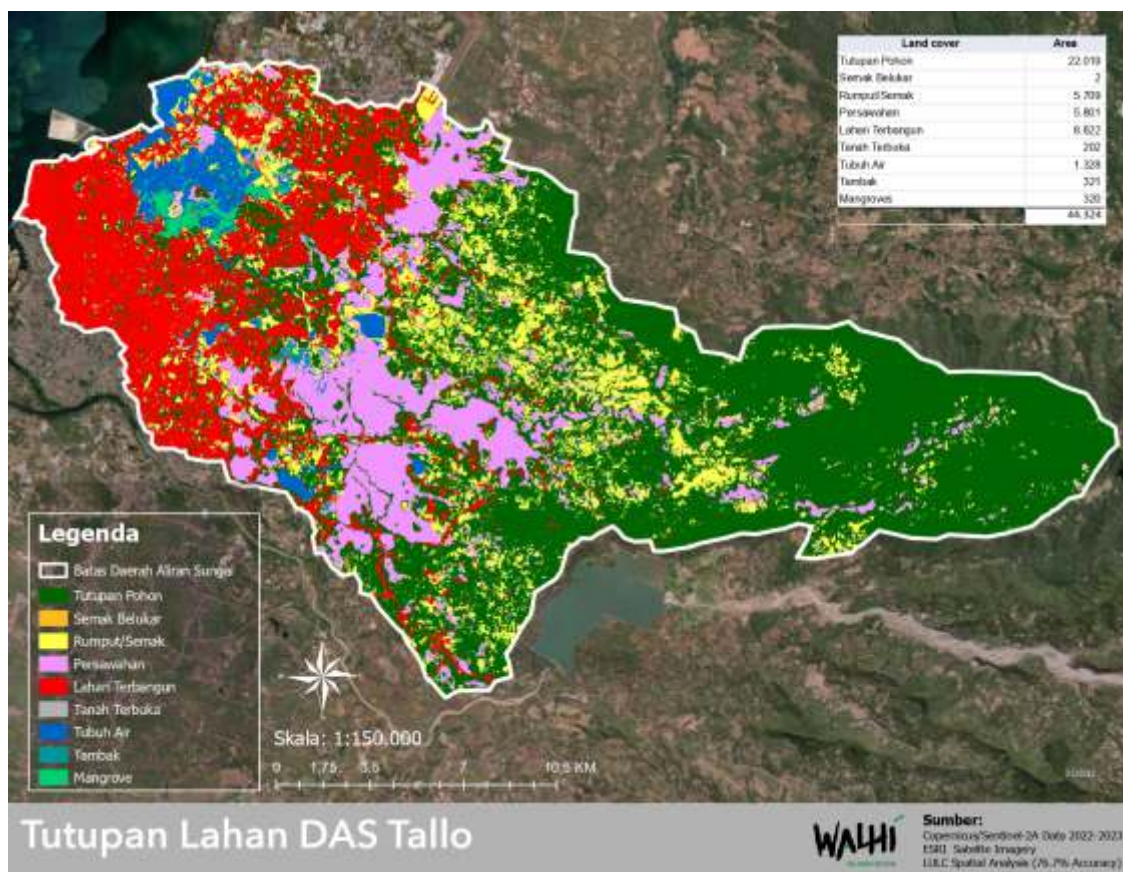
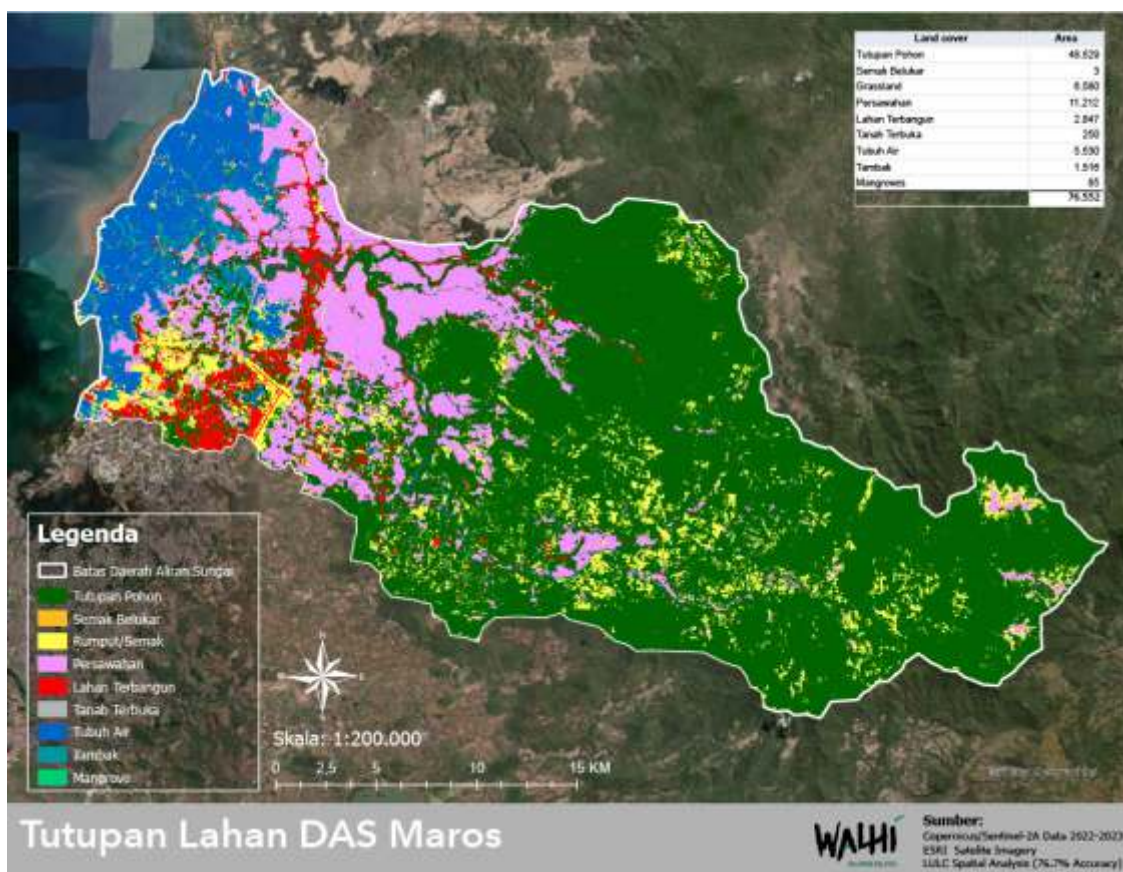
Bencana banjir dan kekeringan yang dialami oleh warga Kota Makassar tahun lalu adalah cerminan dari kritisnya daya dukung serta daya tampung ketiga DAS (Jeneberang, Tallo, dan Maros) yang turut mempengaruhi sistem hidrologi Kota Makassar. Pasalnya, ketiga DAS ini hanya memiliki tutupan hutan di bawah angka 30%. Dimana hal ini turut mempengaruhi fungsi hutan dalam proses infiltrasi air ke dalam tanah, mengurangi laju sedimentasi yang dapat mengurangi daya tampung sungai, dan menjaga kestabilan iklim mikro suatu wilayah. Jika hutan di daerah dataran tinggi atau hulu daerah aliran sungai rusak, dapat dipastikan daerah di dataran rendah akan mengalami banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau.

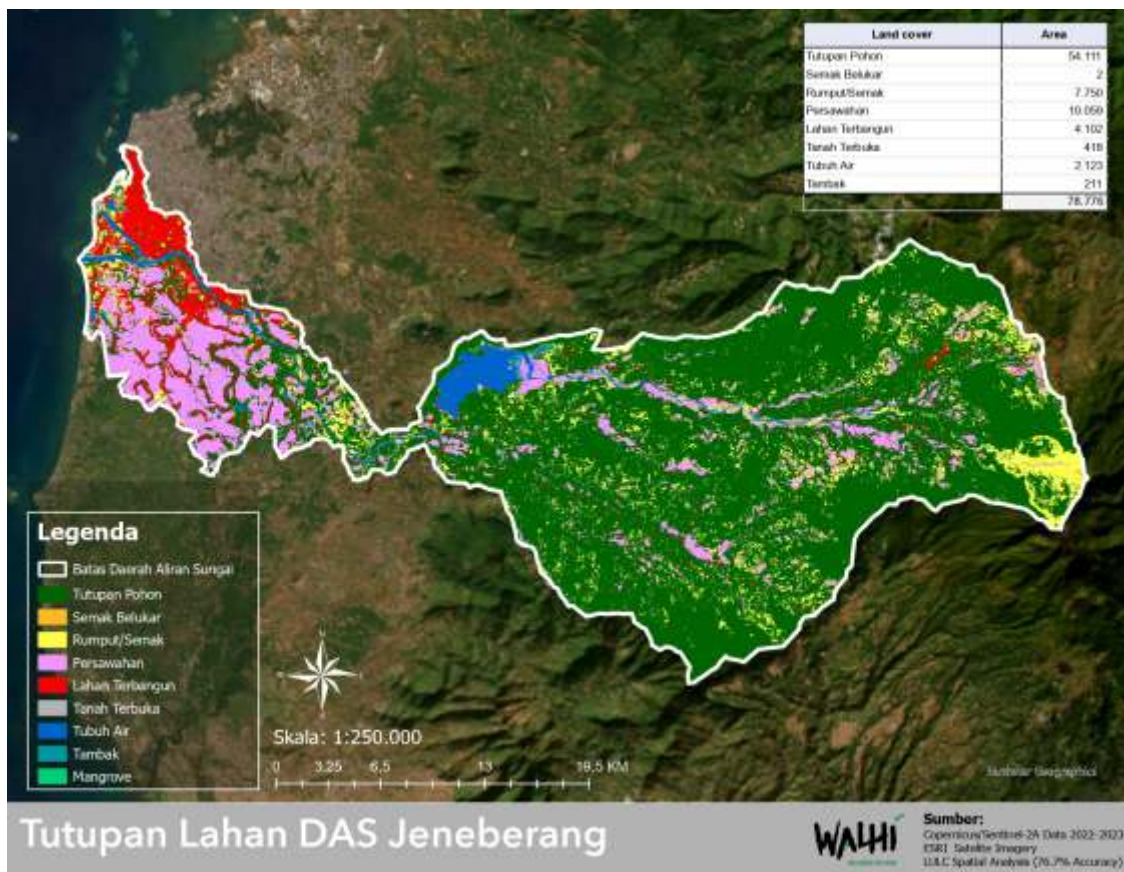


Bendungan Bili-Bili yang Mengalami Kekeringan (*sumber Kompas, 2024*)

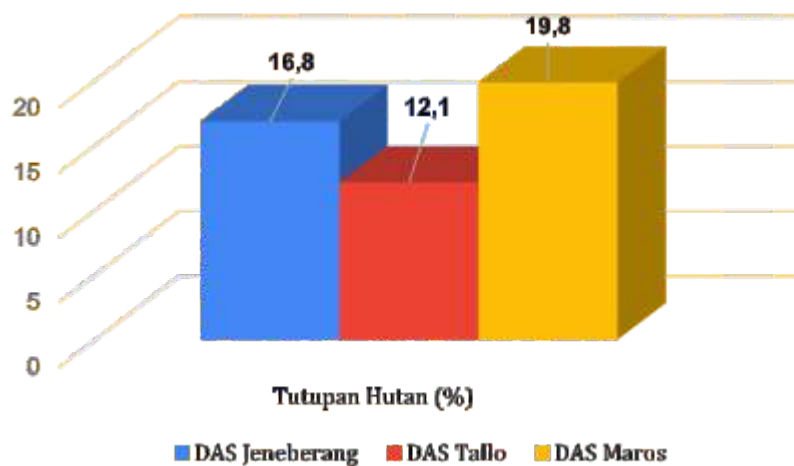


Bendungan Lekopancing yang Mengalami Kekeringan (*sumber Kompas, 2024*)





Persentase Tutupan Hutan



Persentase Tutupan Hutan di Ketiga DAS yang Mempengaruhi Sistem Ekologi dan Hidrologi Kota Makassar. Dimana berdasarkan analisa spasial WALHI Sulawesi Selatan Menunjukkan bahwa Tutupan Hutan pada ketiga DAS tersebut semuanya di bawah angka 30%. DAS Jeneberang hanya Memiliki tutupan Hutan sekitar 16,8%, DAS Tallo Memiliki Tutupan Hutan 12,1%, dan DAS Maros Memiliki Tutupan Hutan sekitar 19,8%



“
Perempuan Lansia
yang sedang menunggu
Air PDAM yang tidak
 kunjung mengalir

BAGIAN II

Krisis Air di Tengah Krisis Iklim: Kesaksian Warga Kota Atas Permasalahan Air Bersih di Makassar

Air merupakan molekul kimia yang penting bagi kehidupan seluruh makhluk di bumi. Salah satu faktor utama yang membuat bumi menjadi satu-satunya planet layak huni yaitu tersedianya air. Cairan air menutupi sekitar 70% permukaan bumi dengan 95,6% di laut, 4,4% di gletser, lapisan es, air tanah, danau, sungai, tanah (kelembaban), dan atmosfer. Meski volume air di bumi terhitung melimpah, tetapi air yang layak guna terancam mengalami krisis.

Kelangkaan atau krisis air merupakan masalah yang semakin meningkat di setiap wilayah, dan masyarakat miskin merupakan kelompok yang paling rentan terkena dampak, utamanya kelompok perempuan. Perubahan iklim memperburuk kelangkaan air. Dampak perubahan iklim membuat air semakin sulit diprediksi. Air dan perubahan iklim mempunyai keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Perubahan iklim mempengaruhi kondisi air dunia dengan cara yang kompleks. Mulai dari pola curah hujan yang tidak dapat diprediksi hingga menyusutnya lapisan es, naiknya permukaan air laut, banjir, dan kekeringan (UNWATER, 2024).

Saat ini sekitar 90% bencana iklim berhubungan dengan air. Negara-negara berpendapatan rendah dan menengah adalah pihak yang paling dirugikan dalam menghadapi bencana iklim ini. Mengingat kerentanan yang ada di berbagai bidang seperti pangan, air, kesehatan, dan infrastruktur, membuat negara-negara tersebut semakin terpuruk, termasuk Indonesia. Dalam ketidakadilan yang lebih mendalam, komunitas-komunitas ini juga merupakan kelompok yang memberikan kontribusi paling kecil terhadap perubahan iklim tapi justru menjadi kelompok paling rentan terdampak akibat krisis iklim (Water for People, 2024).

Berdasar dari uraian di atas, lantas timbul pertanyaan seperti apa situasi krisis air bersih di Kota Makassar dan Kecamatan Tallo pada khususnya. Untuk menjawab pertanyaan ini, WALHI Sulawesi Selatan menggunakan metode jajak pendapat melalui penyebaran kuesioner online untuk wilayah Makassar secara umum dan kuesioner offline untuk tiga kelurahan yang ada di Kecamatan Tallo yakni Buloa, Tallo, dan Kaluku Bodoa.

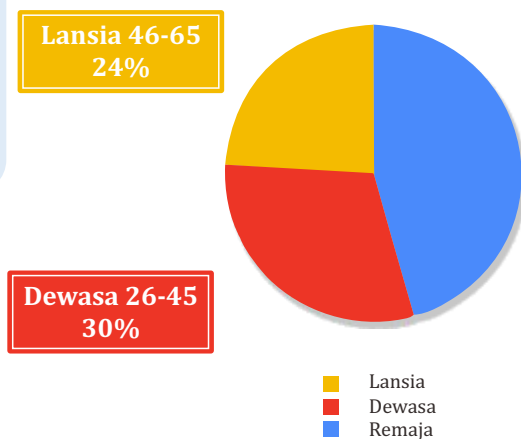


Hasil Jajak Pendapat Warga Kota Makassar terkait Pelayanan Air Bersih

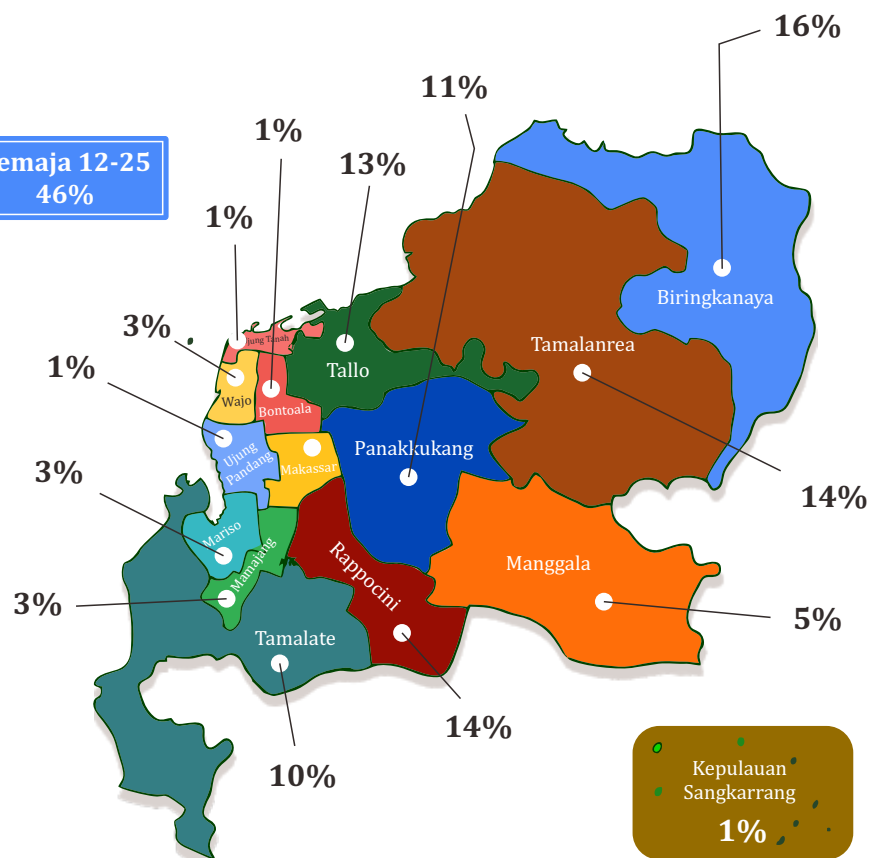
Pada bulan juni sampai juli 2024, WALHI Sulawesi Selatan telah menyebarkan kuesioner secara online. Dalam penyebaran kuesioner ini, WALHI Sulawesi Selatan menerima kurang lebih 78 responden yang tersebar di tiap kecamatan di Kota Makassar. Dari total 78 responden yang mengisi kuesioner terkait soal krisis air dan isu perubahan iklim, didominasi oleh responden yang berasal dari Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Rappocini, Panakkukang, dan Tallo. Dimana mayoritas penduduk yang berasal dari kecamatan ini merupakan warga yang terdampak krisis air.

Selain itu, para responden juga didominasi oleh perempuan dengan persentase 54% dan laki-laki 46% yang dapat diasumsikan bahwa dampak dari air bersih lebih dominan dirasakan oleh laki-laki ketimbang perempuan. Adapun persentase kelompok umur yang mengisi kuesioner online ini adalah mereka yang berasal dari kelompok umur remaja sekitar 46%, dewasa 30%, dan lansia 24% yang mengindikasikan bahwa masalah air bersih merupakan masalah yang dirasakan oleh tiap orang atau semua kalangan.

Presentase Kelompok Umur



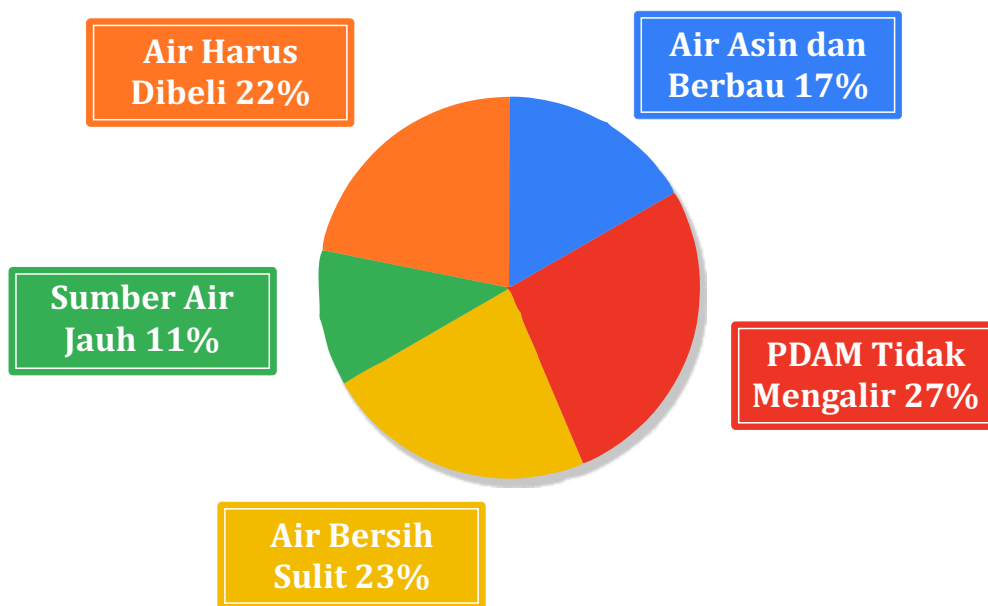
Sebaran Responden



Persentase Kelompok Umur & Sebaran Responden Riset Air Bersih di Kota Makassar

Selanjutnya, dari 78 responden ada sekitar 74% yang menyatakan bahwa mereka mengalami krisis air bersih dan sisanya 26% tidak pernah mengalami masalah krisis air. Adapun masalah kesulitan air bersih yang dialami oleh warga Kota Makassar yakni didominasi oleh persoalan PDAM yang tidak mengalir (27%), Air bersih yang sulit (23%), Sumber Air Jauh (11%), Air yang harus dibeli (22%), dan Kualitas air yang kurang baik (17%)

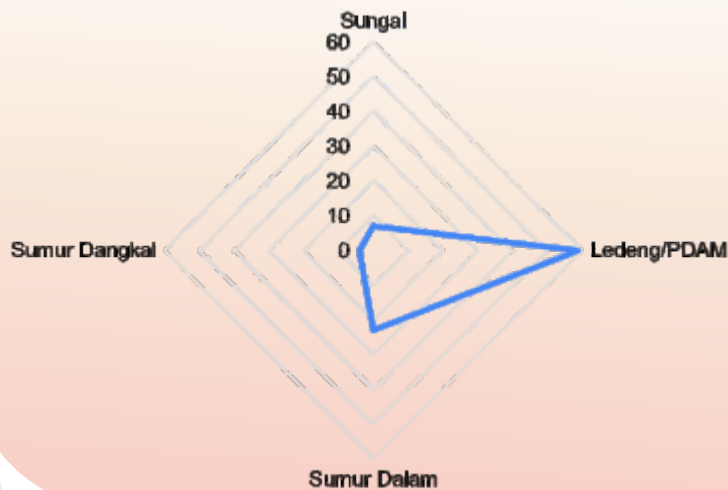
Jenis Kesulitan Air Bersih



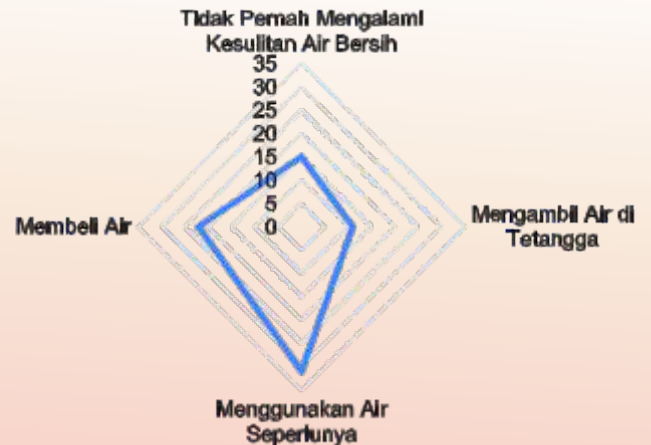
Jenis Kesulitan dan Masalah Air Bersih bagi Warga Kota Makassar

Meskipun masalah utama air di Kota Makassar adalah PDAM yang tidak mengalir, namun sebagian besar warga Kota Makassar tetap memilih PDAM sebagai sumber air yang mereka harapkan dan beberapa warga juga memilih untuk menggunakan sumur dalam. Hal ini dikarenakan rata-rata kualitas sumur dangkal di Kota Makassar sudah tercemar. Tahun lalu, saat Makassar dilanda kemarau panjang akibat fenomena krisis iklim ternyata banyak warga yang harus menghemat pemakaian air dan membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dimana, rata-rata uang yang harus dikeluarkan oleh tiap rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan air bersih yakni sekitar 500 ribu sampai 1 juta rupiah (73%), 100 ribu sampai 500 ribu (24%), dan pengeluaran di atas 1 sampai 3 juta (3%).

Sumber Air yang Diharapkan

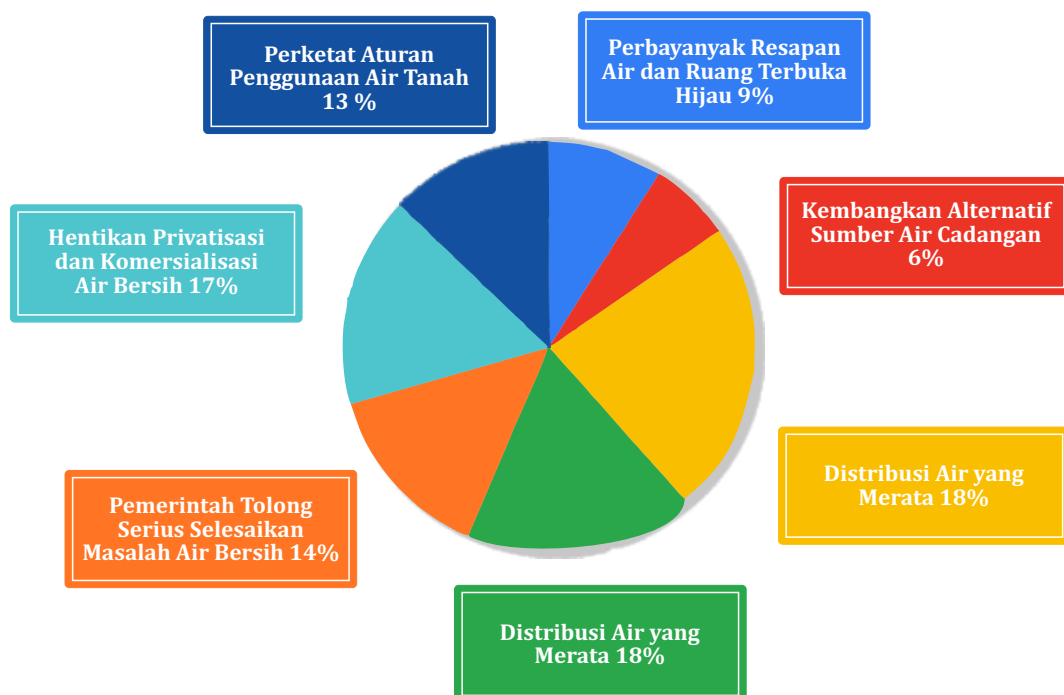


Adaptasi Warga di Tengah Krisis Iklim



Harapan dan Tuntutan Masyarakat Kota Makassar kepada Pemerintah terkait dengan Tata Kelola Air Bersih

Harapan dan Tuntutan Masyarakat Kota Makassar kepada Pemerintah terkait dengan Tata Kelola Air Bersih



Harapan dan Tuntutan Masyarakat Kota Makassar kepada Pemerintah terkait dengan Tata Kelola Air Bersih

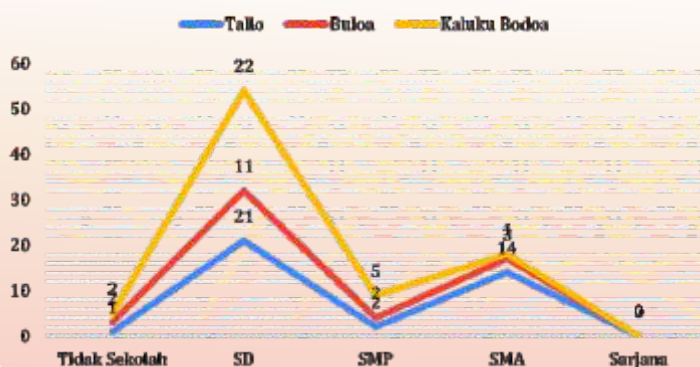
Oleh karena itu, kami juga menghimpun masukan-masukan dari para responden terkait dengan perbaikan tata kelola air bersih di Kota Makassar. Dimana masukan paling utama terkait sistem tata kelola air bersih ini adalah soal (1) Pemerintah harus meningkatkan kualitas air bersih (23%); (2) Mendistribusikan air bersih secara merata (18%); (3) Hentikan privatisasi dan komersialisasi air bersih (17%); (4) Pemerintah harus serius mengurus masalah air bersih (14%); (5) Pemerintah harus memperketat penggunaan air tanah di Kota Makassar (13%); (6) Perbanyak daerah resapan air dan ruang terbuka hijau (9%); dan (7) Mengembangkan teknologi alternatif sumber air cadangan (6%).



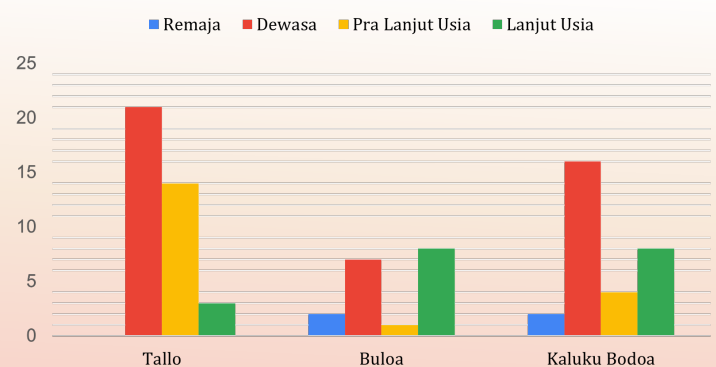
Hasil Jajak Pendapat Warga Kecamatan Tallo atas Krisis Air yang Mereka Alami

Dalam rentang waktu bulan Juni sampai Juli 2024, WALHI Sulawesi Selatan telah menyebar kuesioner langsung ke masyarakat di tiga kelurahan (Buloa, Kaluku Bodoa, Tallo) yang ada di Kecamatan Tallo. Ada 86 total responden yang berhasil dijangkau dari tiga kelurahan tersebut. Dari total 86 responden di tiga kelurahan didominasi oleh tiga kelompok umur yakni Dewasa, Pra-Lanjut Usia, dan Lanjut Usia dengan persentase jenis kelamin didominasi oleh perempuan. Adapun tingkat pendidikan warga di tiga kelurahan ini rata-rata tamatan sekolah dasar (SD). Selain itu, tiga kelurahan ini juga dikenal dengan pemukiman padat dimana dalam satu rumah rata-rata memiliki 3 sampai 5 orang dan 5 sampai 10 orang.

Persentase Tingkat Pendidikan Responden

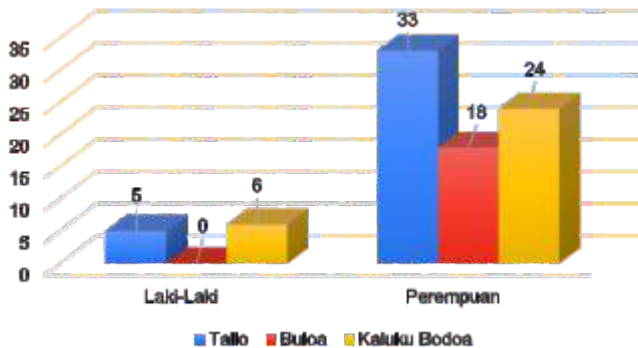


Persentase Umur Warga di Kecamatan Tallo

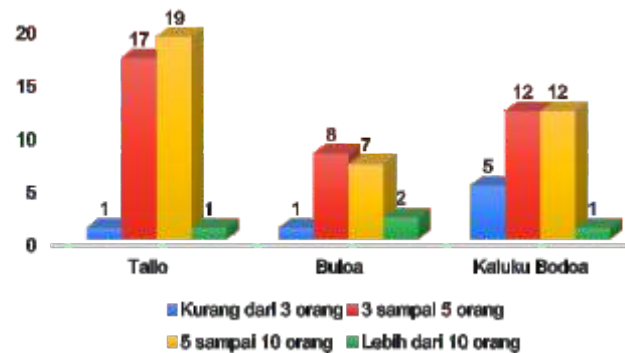


Persentase Uur Warga di Kecamatan Tallo & Persentase Tingkat Pendidikan Responden

Persentase Jenis Kelamin

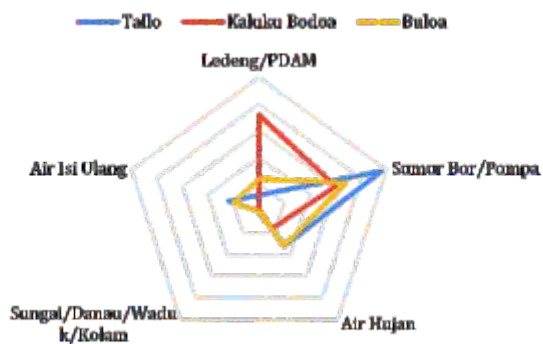


Persentase Jumlah Anggota Keluarga

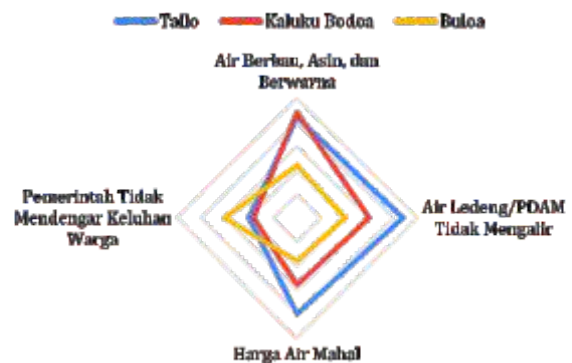


Persentase Jenis Kelamin & Persentase Jumlah Anggota Keluarga

Sumber Air Bersih



Masalah Air Bersih

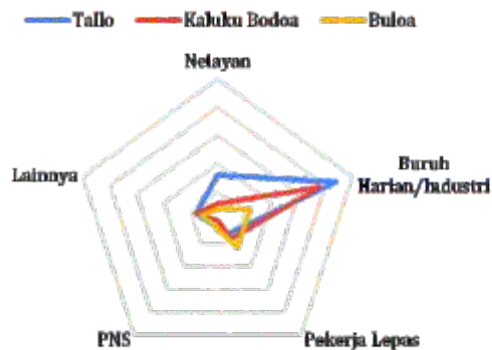


Persentase Sumber Air Bersih & Persentase Masalah Air

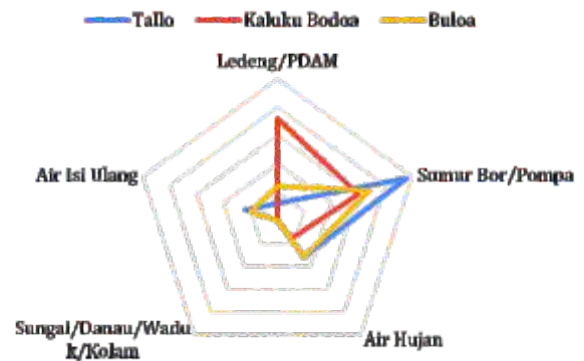
Terkait masalah air bersih, warga di tiga kelurahan ini hampir semuanya mengeluhkan soal kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air bersih yang mereka dapatkan. Semisal di Kelurahan Tallo mereka paling mengeluhkan soal 'Air PDAM yang tidak mengalir', Kelurahan Buloa mengeluhkan soal 'Pemerintah yang tidak pernah mendengar keluhan warga soal air bersih', dan Kelurahan Kaluku Bodoa yang mengeluhkan soal 'Air berbau, asin, dan berwarna'.

Olehnya itu, hampir semua warga di tiga kelurahan ini masih mengandalkan air sumur bor meskipun secara kualitas sangat tidak layak atau mereka biasanya terpaksa harus membeli air PDAM yang dijual oleh para pengusaha air yang banyak dijumpai di tiga kelurahan ini. Rutinitas membeli air dengan rata-rata pengeluaran sebesar Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000 dalam sebulan sangatlah membebani warga. Terlebih lagi dengan pekerjaan utama mereka sebagai buruh harian atau industri.

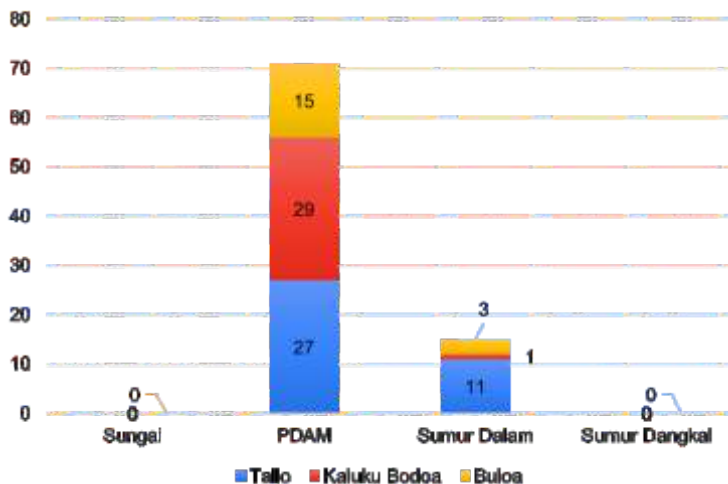
Jenis Pekerjaan



Sumber Air Bersih



Sumber Air yang Diminati



Cara Menghadapi Kelangkaan Air Bersih



Persentase Cara Menghadapi Kelangkaan Air Bersih, Persentase Sumber Air Bersih, Persentase Jenis Pekerjaan dan Persentase Sumber Air yang Diminati

Terakhir, kelangkaan air bersih yang dialami oleh warga yang ada di tiga kelurahan ini membuat mereka harus menempuh dua cara sama seperti yang dibahasakan sebelumnya yakni menghemat air atau harus membeli air bersih yang jumlahnya sangatlah fantastis. Selain itu, warga juga sangat berharap agar PDAM segera mendistribusikan air bersih langsung ke rumah-rumah warga yang ada di Kecamatan Tallo.



Salah satu tuntutan perempuan di Kelurahan Tallo, Buloa, dan Kaluku Bodoa terkait Pelayanan Air Bersih

BAGIAN III

Darurat Air di Pesisir Utara Kota Makassar

Tiap musim kemarau, masyarakat yang tinggal di utara Kota Makassar akan mengalami kekeringan ekstrim. Kondisi ini dipicu akibat distribusi pipa dan air bersih dari PDAM tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Padahal saat ini, Kota Makassar telah memiliki lima Instalasi Pengolahan Air (IPA) untuk mendukung pelayanan air bersih warga Kota Makassar. Adapun kelima IPA yang saat ini eksisting di Kota Makassar yakni IPA I Ratulangi, IPA II Panaikang, IPA III Antang, IPA IV Maccini Sombala dan IPA V Somba Opu.

Meskipun saat ini telah tersedia lima IPA, namun sampai sekarang masih banyak masyarakat di Kecamatan Tallo yang belum mendapatkan air bersih. Terlebih lagi di beberapa titik, ternyata kebanyakan warga tidak dapat lagi menggunakan air bor (air tanah) karena sebagian besar air tanah di pesisir utara Kota Makassar telah mengalami intrusi air laut sehingga mengharuskan warga untuk membeli air untuk kebutuhan sehari-hari mereka (Invanni, Nasiah, Jaya. 2023).



Cerita dari Tiga Kampung Pesisir Makassar

1. Perkampungan Galangan Kapal Kaluku Bodoa

Disini kalau kemarau, kekeringan maki. Apalagi kalau tidak ada air (dijual) di H. Kahar sama Dg Masiga langsung ke Barukang (Kec. Ujung Tanah) semua orang subuh-subuh mengantri. Tahun lalu, disana (Barukang) berduit semua orang karena menjual air i dari pagi sampai pagi (24 jam). Ibu Wana, Perempuan dengan Anak Tiga yang Mengontrak di Galangan Kapal

Ibu Wana, warga asal Kaluku Bodoa tepatnya di Kampung Galangan Kapal, telah bertahun-tahun merasakan sulitnya mengakses air bersih. Apa yang dirasakan oleh Ibu Wana dan ribuan warga yang tinggal di Kelurahan Kaluku Bodoa merupakan 'anomali' tersendiri bagi mereka yang terdaftar sebagai penduduk Kota Makassar. Kota yang didaulat sebagai pusat industri dan jasa di Kawasan Indonesia Timur dan sering dijuluki sebagai Kota Dunia.

Galangan Kapal, *Daratan Baru di Utara Pesisir Makassar*



Potret Perkampungan Galangan Kapal di Kelurahan Kaluku Bodoa

Galangan Kapal merupakan suatu kampung kota yang masuk dalam Kelurahan Kaluku Bodoa yang secara administratif berada di Kecamatan Tallo. Secara statistik, jumlah penduduk di perkampungan ini kurang lebih sekitar 1.320 penduduk dengan 517 Kepala Keluarga. Secara historis, pada tahun 1990 an perkampungan ini dulunya masih merupakan laut. Namun seiring berjalannya waktu dan adanya proses akresi atau sedimentasi membuat wilayah yang dulunya laut kini berubah menjadi daratan baru akibat pengendapan sedimen yang terbawa oleh air laut.

Selain proses alam, penambahan daratan di perkampungan ini juga dilakukan oleh

beberapa tokoh masyarakat dengan membuat jalan dan menimbun laut. Selanjutnya, beberapa dari tokoh masyarakat yang rata-rata bergelar Haji ini kemudian memiliki aset atau kepemilikan tanah yang sekarang lebih banyak dikontrakkan atau disewakan ke orang lain. Sehingga, baik dari proses alam maupun penimbunan yang dilakukan oleh warga, maka pada 2014 terbentuklah perkampungan baru di utara pesisir Makassar yang saat ini dikenal dengan sebutan Galangan Kapal, karena menurut sejarah tempat ini dulu dan sekarang masih merupakan lokasi beroperasinya PT IKI (Industri Kapal Indonesia).

Akses Air Bersih *yang Mahal dan Timpang*



Potret Tuntutan Perempuan Kepada Pemerintah Kota dan PDAM Kota Makassar

Tiap musim kemarau, warga Galangan Kapal akan mengalami kekeringan hingga mereka harus menempuh jarak yang jauh untuk membeli air bersih. Sebenarnya kampung ini sudah dua kali mengalami perbaikan pipa, namun tetap saja air tidak mengalir secara merata ke setiap rumah. Bahkan, mereka harus kembali mengeluarkan uang sekitar Rp. 5.000.000 sampai Rp. 7.000.000 untuk

memperbaiki saluran pipa agar air dapat mengalir langsung ke rumah mereka. Bagi warga yang memiliki pendapatan berlebih tentu angka tersebut tidak menjadi persoalan, namun bagi mereka yang berstatus ekonomi menengah hingga bawah diharuskan membeli air untuk kebutuhan sehari-hari.

Dulu pernah ada yang nawari untuk mendaftar perbaikan sama sambungan pipa baru. Tapi deh mahal sekali baru pendapatan disini harian ji. Makanya banyak tidak ambil. Tapi ada juga yang ambil dan sekarang mengalir mi air di rumahnya dan lancar.

Ungkap Ibu Wana ketika kami bertemu di rumahnya. Ibu Wana biasanya menggunakan dua sumber air bersih dalam memenuhi kebutuhan keluarganya yakni (1) membeli air ledeng untuk digunakan memasak dan minum; dan (2) menggunakan sumur bor untuk bersih-bersih (mandi dan mencuci). Dalam sehari, Ibu Wana hanya menggunakan satu gerobak (60 liter/hari). Namun beberapa Warga Galangan Kapal yang tidak menggunakan sumur bor, biasanya menggunakan dua sampai tiga gerobak dalam sehari.

Di kampung ini, warga menggunakan atau mengakses air dengan dua cara yakni menggunakan sumur bor dengan kualitas yang buruk (kadang berbau dan berlumpur utamanya ketika musim kemarau) dan membeli air ledeng/PDAM di pengusaha air. Warga Galangan Kapal biasanya membeli air ledeng/PDAM di dua lokasi berbeda yakni di H. Kahar dan Dg. Masiga. Meskipun keduanya mengakses air ledeng dengan pipa yang baru diperbaiki beberapa tahun terakhir, namun aliran air yang mereka dapatkan juga tidak mengalir tiap waktu. Biasanya air akan mengalir di waktu malam hari hingga subuh hari seperti yang disampaikan oleh H. Kahar kepada kami sewaktu berkunjung ke rumahnya.

Disini mi kampung tidak lancar air. Sudah 10 hari mi ini tidak lancar. Air disini jam 3 subuh pi bagus airnya, tapi jam 6 mati mi. Nanti jam 10 lagi baru mengalir tapi tidak lancar. Pernah disini, empat bulan tidak mengalir air. Jadi terpaksa kami pake mobil mengambil air di Barukang. Disana Barukang lancar airnya karena pipanya langsung tersambung di angkatan laut. Ungkap H. Kahar, Penjual Air Ledeng dengan rata-rata pendapatan sekitar Rp. 100.000 sampai Rp. 200.000 per hari dari usaha jualan air

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, rata-rata warga Galangan Kapal membeli air ledeng/PDAM dengan biaya satu gerobak (isi 12 jerigen berukuran 5 liter) sebesar Rp. 8.000 dan jerigen ukuran besar seharga Rp. 1.000 atau satu gerobak sebesar Rp. 12.000. Jika air tersebut diangkut atau menggunakan jasa anak-anak kecil untuk mengangkat atau mendorong, maka harga untuk air satu gerobak pun menjadi Rp. 15.000 - Rp. 17.000 (harga air dan ongkos pengangkutan).

Harga Air Ledeng/PDAM dengan Pemakaian Satu Gerobak/Hari	Pengeluaran Tiap Bulan untuk Membeli Air	Total Biaya yang Dikeluarkan Tiap Orang dalam Setahun untuk Membeli Air
Rp. 8.000 untuk 14 jerigen berukuran 5 Liter (70 liter)	Rp. 240.000/rumah tangga	Rp. 2.880.000/rumah tangga
Rp. 12.000 untuk 12 jerigen berukuran 20 Liter (240 liter)	Rp. 360.000/rumah tangga	Rp. 4.320.000/rumah tangga
Tambahan biaya sewa jasa mengangkut air jadi Total Rp. 15.000 – Rp. 17.000 (Harga Air dan Ongkos Pengangkutan)	Rp. 450.000 – Rp. 510.000 tiap rumah tangga	Rp. 5.400.000 – Rp. 6.120.000 tiap rumah tangga

Estimasi Pengeluaran Air Bersih (Ledeng/PDAM) tiap Rumah Tangga di Kampung Galangan Kapal, Kaluku Bodoa. Jika tiap rumah tangga harus mengeluarkan uang minimal sebesar Rp. 240.000/bulan maka total biaya yang dihabiskan oleh seluruh rumah tangga (517 KK) di Galangan Kapal untuk membeli air bersih tiap bulannya yakni sebesar Rp. 124.080.000 dan Rp. 1.488.960.000 (1,4 M) tiap tahunnya.



Seorang Warga Galangan Kapal yang sedang Mengantarkan Air Bersih ke Pelanggannya. Di Galangan Kapal, pemandangan seperti ini sering dijumpai. Ada banyak warga yang tidak bisa untuk mengambil sendiri air bersih yang mereka telah beli dengan beberapa alasan seperti kesibukan atau kelelahan. Makanya, mereka biasanya akan menggunakan jasa pengangkut air. Biasanya dilakukan oleh anak-anak atau orang dewasa.

Dengan biaya untuk membeli air bersih yang mahal dan mayoritas perekonomian warga yang mengandalkan upah sebagai pekerja harian atau bekerja sebagai buruh industri, maka tentu saja ini menjadi persoalan yang sulit bagi warga yang tinggal di Galangan Kapal. Padahal, pemenuhan terhadap hak atas air bagi warga seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Beberapa kali warga mengusahakan dan meminta tanggung jawab pemerintah, namun beberapa kali juga warga harus termakan janji-janji manis. Hal ini seperti yang telah diusahakan oleh Amir selaku Ketua RW di Galangan Kapal yang menjelaskan betapa sulitnya mereka mengusahakan agar distribusi air di kampung ini merata.

*Saya sudah beberapa kali usulkan. Tapi selalu terkendala masalah status lahan. Menurut pemerintah, tanah yang kami tempati masuk dalam otoritas pelabuhan. Nah, kalau masalahnya seperti itu, sama saja kalau orang yang di Galangan Kapal tidak dianggap sama pemerintah. Sebenarnya, kami disini minta kalau tidak bisa PDAM masuk, buatlah saja kami sumur bor dengan kedalaman 200 Meter sama seperti di Kampung Sinassara yang juga masuk dalam Kelurahan Kaluku Bodoa. Disana orang lancar airnya, tapi disini susah sekali. Kami disini sudah capek di janji-janji soal air. **Ujar Amir mengutarakan kekesalannya dalam mengurus persoalan air bersih di Galangan Kapal.***

Pernyataan Amir, secara eksplisit menyiratkan bahwa selain akses air yang terbilang sangat mahal, jelas terjadi ketimpangan distribusi air yang hanya diprioritaskan pada wilayah lain saja, sementara di Galangan Kapal harus merasakan penderitaan akibat tata kelola air bersih yang sangat buruk di tengah geliat pembangunan yang masif di sekitar pelabuhan Makassar New Port.

2. Perkampungan Buloa

“Saya mau membayar beban Air, tapi airnya tidak jalan, sedangkan pendapatan saya bisa lihat sendiri ketika saya pulang dari melaut” **Bapak Muhammad, Warga Kampung Buloa yang sudah tidak lagi dialiri air PDAM namun tetap membayar beban.**

Kampung Buloa terletak di Kelurahan Buloa RT 08 RW 02. Sebuah pemukiman warga dan nelayan di wilayah pesisir Kota Makassar. Tahun 1970 an warga mulai merintis pemukiman dengan membangun rumah panggung diatas laut. Perlahan-lahan warga memanfaatkan sedimentasi dan menimbun secara mandiri Ketika air laut sedang surut. Kampung Buloa dihuni sekitar 800 jiwa (210 KK) yang tersebar di lima Lorong. Kampung ini merupakan pemukiman padat penduduk Masyarakat miskin kota, dengan rumah yang saling berdempetan.



Lanskap Perkampungan Buloa

Mayoritas warga kampung Buloa bekerja di sektor informal, sebagai nelayan, buruh harian lepas, tukang becak dan pedagang kecil. Sejak tahun 2008 hingga 2009 kasus penggusuran kampung Buloa mulai mencuat, kampung yang sejak tahun 1970 berada diatas laut di klaim oleh pihak swasta. Tahun 2012 pihak yang mengklaim tanah di kampung Buloa Kembali ingin melakukan penggusuran secara paksa. Warga menolak tawaran ganti rugi serta memprotes pematokan pagar. Selain Pihak swasta yang mengklaim tanah kampung Buloa, ancaman tersebut juga muncul dari Negara dalam hal ini PT Pelindo dibawah naungan BUMN. Perluasan Pembangunan Pelabuhan peti kemas secara perlahan-lahan mengancam wilayah Kelola dan ruang hidup Masyarakat kampung Buloa.

Secara historis warga kampung Buloa memiliki jejak perlawanan terhadap mafia tanah, kesadaran mempertahankan ruang hidup sebagai bagian dari perjuangan hak asasi manusia. Alih-alih negara melakukan perlindungan, pemenuhan serta penghormatan terhadap hak dasar setiap warga negara, yang terjadi justru sebaliknya. Sebagai sebuah pemukiman warga miskin kota, ketersediaan infrastruktur dalam akses terhadap pelayanan dasar perlu menjadi perhatian khusus negara demi menunjang kehidupan Masyarakat Buloa. Problem pelayanan dasar tersebut telah dialami warga kampung Buloa selama puluhan tahun, salah satunya akses terhadap air bersih dalam mencapai standar penghidupan yang layak untuk Kesehatan dan kesejahteraan.



Kekeringan *yang Diwariskan*

Sulitnya akses terhadap air bersih secara turun temurun dirasakan oleh warga kampung Buloa hingga saat ini. Jarak sumber air dengan pemukiman warga yang agak jauh mengharuskan warga mendorong gerobak setiap hari, untuk memperoleh air sumur bor dan air PDAM. Sumber air yang terdekat dari pemukiman warga yaitu sumur bor, jaraknya bisa mencapai 50-100 meter.

Sumur bor merupakan sumber air yang turut menopang kehidupan Masyarakat Kampung Buloa, sebab hampir keseluruhan warga kampung menggunakan air sumur bor. Peruntukannya pun juga beragam, untuk mandi, mencuci, serta sanitasi. Sumur bor yang digunakan warga hingga sekarang merupakan bantuan pemerintah (PAMSIMAS) pada tahun 2016 dengan kedalaman 150 meter. Sebelumnya bantuan yang sama juga hadir pada tahun 2011, namun lokasinya begitu dekat dengan laut dan airnya pun keruh.

*Tandon Air di Depan Rumah
Warga yang Biasanya
Digunakan untuk
Menampung Air Hujan. Cara
ini Biasanya Dilakukan untuk
Meminimalisir Pengeluaran
Warga dalam Membeli Air
Bersih. Jadi Bagi sebagian
Masyarakat di Kecamatan
Tallo Musim Hujan
Merupakan Berkah untuk
Mereka*



Aktivitas warga kampung Buloa mendorong gerobak demi mendapatkan air begitu mudah kita jumpai, mulai dari anak-anak, remaja, perempuan, hingga orang dewasa. Siklus semacam ini berlangsung sejak lama, bahkan ada yang mendorong gerobak sejak anak-anak hingga masuk usia remaja. Sejak pukul 5 subuh, warga mulai mengantri mengambil air, bahkan hingga pukul 11 malam. Walaupun sumur bor yang digunakan warga bantuan pemerintah, tetapi pengelolaan serta perawatannya diberikan kepada RW setempat. Setiap bulan biaya Listrik yang digunakan bisa mencapai 2-3 juta untuk mengoperasikan air sumur bor.

Harga Air Sumur Bor dengan Pemakaian Satu Gerobak/Hari	Pengeluaran Tiap Bulan untuk Membeli Air	Total Biaya yang Dikeluarkan Tiap Orang dalam Setahun untuk Membeli Air
Rp. 3.000 untuk 14 jerigen berukuran 5 Liter (70 liter)	Rp. 90.000/rumah tangga	Rp. 1.080.000/rumah tangga
Tambahan biaya sewa jasa mengangkut air jadi Total Rp. 6.000 – Rp. 8.000 (Harga Air Bor dan Ongkos Pengangkutan)	Rp. 180.000 – Rp. 240.000/rumah tangga	Rp. 2.160.000 – Rp. 2.880.000 rumah tangga

Estimasi Pengeluaran Air Bersih (Sumur Bor) tiap Rumah Tangga di Kampung Bulo. Jika tiap rumah tangga harus mengeluarkan uang minimal sebesar Rp. 90.000/bulan maka total biaya yang dihabiskan oleh seluruh rumah tangga (210 KK) di Buloa untuk membeli air bersih tiap bulannya yakni sebesar Rp. 18.900.000 dan Rp. 226.800.000 tiap tahunnya.

Dalam sehari, warga rata-rata menggunakan air sumur bor sebanyak dua gerobak, satu gerobak menampung 14 jerigen ukuran 5 liter. Biaya yang dipatok dalam satu gerobak senilai Rp. 3.000, jika dua gerobak maka Rp. 6.000. Selain biaya pembelian air, warga juga menggunakan jasa angkut air dengan memanfaatkan tenaga Masyarakat setempat, terutama anak-anak. Namun tak semua warga menggunakan jasa angkut tersebut, Untuk jasa angkut air biayanya pun relatif, mulai Rp. 3.000-Rp. 5.000/gerobak. Jika dikalkulasikan, biaya yang dikeluarkan warga setiap bulan untuk air sumur bor bisa mencapai Rp. 200.000-Rp. 250.000.

Kalau musim kemarau, airnya (sumur bor) kering sekali, apalagi kalau kemarau panjang, agak asin-asin. Kalau musim hujan airnya tidak asin lagi, ada juga perbedaannya. Tapi memang dari dulu air PDAM Susah sekali. Ujar Ibu Hajra, pengguna air sumur bor di kampung Buloa.

Biaya tersebut termasuk besar jika dikenakan kepada masyarakat kelas bawah/miskin perkotaan, yang mayoritas bekerja di sektor informal. Besaran biaya pun tak sebanding dengan kualitas air sumur bor yang tiap tahun mengalami perubahan. Jika dimusim kemarau, akan terasa sedikit asin. Tak ada pilihan lain, satu-satunya sumber air yang mudah diakses oleh warga ialah sumur bor. 210 kepala keluarga bergantung kepada satu sumber air bor dan satu sumber air PDAM. Situasi tersebut menunjukkan adanya krisis air, terutama air bersih masih dirasakan oleh masyarakat miskin perkotaan dalam jangka waktu yang cukup lama.

Ironisnya, problem dan keresahan ini hadir di tengah gencarnya pembangunan kota, tak semua warga kota mampu mengakses air bersih. Keterbatasan akses air bersih bukanlah sesuatu yang alamiah, Sebab, sebuah jenis sumber daya harus tetap dalam kondisi dapat

diakses oleh semua (Open Access), apalagi yang menyangkut tentang hak dasar dan kebutuhan hidup warga negara. Namun telah menjadi problem struktural, siapa mampu mengakses apa dan siapa mampu membayar apa.

Jika dilihat secara kebutuhan, air sumur bor tentu tak cukup bagi warga kampung Buloa. Perlu ada sumber air lain yang bisa dijangkau oleh warga kampung, terutama air PDAM untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Salah satu sumber air PDAM yang digunakan oleh warga kampung Buloa jaraknya cukup jauh, bisa mencapai 200-300 meter. Sumber air PDAM tersebut dikelola oleh perseorangan selama bertahun-tahun, letaknya tepat berada di depan pintu masuk Makassar New Port, salah satu Proyek Strategis Nasional di Kota Makassar.

Biaya yang dipatok tergantung ukuran jerigen, 1000 rupiah untuk ukuran 20 liter dan 500 rupiah untuk ukuran 10 liter. Bagi warga kampung, air PDAM digunakan untuk minum, Sebagian warga dipakai untuk mencuci, tidak setiap hari warga membelinya, tergantung kebutuhan dalam setiap rumah. Penggunaan air PDAM dalam setiap rumah pun beragam, ada warga yang menggunakan 100 liter/ minggu, ada pula 120 liter/4 hari, tergantung kebutuhan dan jumlah anggota keluarga dalam setiap rumah.



Anak-Anak di Perkampungan Buloa yang Sedang Mendorong Gerobak Air

Harga Air Ledeng/PDAM dengan Pemakaian Satu Gerobak/Hari	Pengeluaran Tiap Bulan untuk Membeli Air	Total Biaya yang Dikeluarkan Tiap Orang dalam Setahun untuk Membeli Air
Rp. 7.000 untuk 14 jerigen berukuran 5 Liter (70 liter)	Rp. 210.000/rumah tangga	Rp. 2.520.000/rumah tangga
Rp. 12.000 untuk 12 jerigen berukuran 20 Liter (240 liter)	Rp. 360.000/rumah tangga	Rp. 4.320.000/rumah tangga
Tambahan biaya sewa jasa mengangkut air jadi Total Rp. 15.000 – Rp. 17.000 (Harga Air dan Ongkos Pengangkutan)	Rp. 450.000 – Rp. 510.000/rumah tangga	Rp. 5.400.000 – Rp. 6.120.000/rumah tangga

Estimasi Pengeluaran Air Bersih (Ledeng/PDAM) tiap Rumah Tangga di Kampung Buloa. Jika tiap rumah tangga harus mengeluarkan uang minimal sebesar Rp. 210.000/bulan maka total biaya yang dihabiskan oleh seluruh rumah tangga (210 KK) di Buloa untuk membeli air bersih tiap bulannya yakni sebesar Rp. 44.100.000 dan Rp. 529.200.000 tiap tahunnya.

Pengusaha air PDAM tersebut juga melayani kebutuhan warga di 4 kelurahan, Kelurahan Tallo, Buloa, Kaluku Bodoa dan Sabutung. Jika di musim kemarau 8-10 kubik air terjual dalam satu hari, sedangkan di musim hujan pembelinya agak berkurang. Tak tanggung-tanggung, dalam sehari pengusaha air PDAM pendapatannya bisa mencapai Rp. 400.000 sampai Rp. 500.000 dalam sehari. Sedangkankan untuk tagihan perbulannya ke PDAM sebesar Rp. 5.000.000 sampai Rp. 7.000.000 per bulan. Dua mesin dinamo air digunakan ketika sedang banyak pembeli, selain itu juga disediakan pula beberapa gerobak dan jerigen secara gratis kepada warga yang ingin menggunakan.

Keuntungan berlipat didapatkan oleh pengusaha air, sementara beban berlapis dirasakan oleh warga kampung Buloa. Selama puluhan tahun pengusaha air PDAM beroperasi di tengah warga yang mengalami kekurangan air. Ketersediaan air bersih yang merupakan salah satu tujuan dari pembangunan berkelanjutan justru di komersialisasi, Situasi tersebut diabaikan oleh Pemerintah Kota Makassar. Jika dilihat jarak kampung Buloa dengan pengusaha air PDAM, sangat memungkinkan instalasi pipa bisa masuk ke wilayah perkampungan.

Di Tahun 2007-20010, beberapa rumah warga di kampung Buloa sempat dialiri air PDAM, jumlah warga yang menggunakan tak cukup banyak. beberapa tahun sempat dinikmati oleh warga. Tahun 2011 dan seterusnya, air PDAM tak lagi mengalir, sementara warga diwajibkan membayar beban. Seperti yang dialami bapak Muhammad, hampir setengah tahun membayar beban namun air pun tak kunjung mengalir. Tentu situasi tersebut semakin membebani warga, terutama dalam aspek ekonomi.



Sampai saat ini, tidak ada sikap yang jelas mengapa air PDAM tak lagi mengalir ke rumah warga. Berbagai alasan diutarakan oleh Pemerintah Kota terutama PDAM, terkait sulitnya akses air bersih bagi warga kampung Buloa, diantaranya dataran tinggi, mesin pendorong dan perpipaan yang kecil, serta akses lahan bagi jalur pipa. Hal tersebut tentu dipertanyakan di tengah kehadiran Proyek Strategis Nasional Makassar New Port yang berdampingan dengan perkampungan-perkampungan yang mengalami krisis air bersih. Proyek sebesar itu tentu memiliki akses air bersih dan banyak, daratannya pun lebih tinggi ketimbang pemukiman warga. Lantas hal apa yang membuat sulitnya akses air bersih bagi warga kampung Buloa selama puluhan tahun.

3. Perkampungan Makam Raja-Raja Tallo

"Kalau tidak ada air tidak jadi. Karena tidak makan ki, tidak minum ki, tidak mencuci ki. Biar ada beras berkarung-karung, ada gas, kalau tidak ada air, tidak mungkin kita mau masak kering. Penting sekali air kodong". **Dg. Ngendong (Warga RW 05 Kelurahan Tallo)**

Air bersih masih menjadi barang langka dalam kehidupan Masyarakat di Kelurahan Tallo. Kelangkaan air bersih telah menjadi masalah berkepanjangan. Kurun waktu kurang lebih 20 tahun lamanya, warga seolah membiasakan diri hidup berdampingan dengan sulitnya akses terhadap air bersih. Akses air bersih meliputi ketersediaan sumber air seperti air ledeng (PDAM), air sumur/sumur bor (air tanah), dan juga air sungai/danau yang berada di sekitar Kelurahan Tallo. Ketiga jenis air tersebut tidak dapat diakses secara memadai. Masyarakat

merasakan sulitnya akses air bersih dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya. Sulitnya akses terhadap air bersih berbanding lurus dengan masalah lain seperti ekonomi, kesehatan, hingga sosial budaya masyarakat setempat.

Akses air bersih yang ada di Kelurahan Tallo umumnya berada dalam kondisi tidak memadai, baik ketersediaan sumber air itu sendiri, maupun sarana/fasilitas pendukung atas akses air bersih. Namun, fakta menarik dari hasil penelusuran ditemukan adanya ketimpangan akses air bersih berdasarkan distribusi dan pengelolaannya. Meski mayoritas dari total lima (5) RW yang berada di Kelurahan Tallo merasakan sulitnya akses air bersih, namun, tidak demikian dengan Masyarakat yang berada di RW 05.



Potret Perkampungan Makam Raja-Raja Tallo yang Lokasinya tepat Berada di Muara Sungai Tallo. Kampung ini secara administratif berada di wilayah RW 5 Kelurahan Tallo

Wilayah RW 05 menjadi yang tersulit dalam hal akses terhadap air bersih. Wilayah RW 05 berada dekat dengan situs peninggalan budaya yaitu makam Raja-Raja Tallo, beberapa bangunan atau gudang industri, dan pesisir Sungai Tallo. Kondisi miris tersebut tidak saja menjadi masalah yang terus mengemuka, namun menjadi kisah pilu masyarakat sekitar yang belum mendapat perhatian maksimal dari berbagai pihak.

Fokus penelitian yang menitik beratkan pada wilayah RW 05 tidak bermakna mengaburkan keberadaan RW lain yang juga memiliki kesamaan kondisi atas persoalan akses air bersih.

Perbedaan mencolok pada distribusi sumber air bersih dan ketersediaan sarana pendukungnya menjadi substansial dalam melihat secara mendalam kondisi yang nampak tidak sama pada setiap RW yang ada di Kelurahan Tallo.

Gambaran

Pengelolaan Air Bersih Tallo



Wilayah RW 01, 03, dan 05 secara umum memiliki kesamaan yang cukup banyak. Ketiga wilayah RW ini memiliki keterbatasan terhadap akses air bersih. Sumber air bersih (utamanya air sumur bor) dengan sarana penunjang seperti bak air atau tandon penampungan air tidak sebanyak seperti yang ada di RW 02 dan RW 04. Ketersediaan sumber air bersih dan sarana penunjang di RW 02 dan 04 sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan wilayah RW yang lain.

Di kedua wilayah RW tersebut, terdapat sumber air bersih yang dapat diakses langsung oleh masyarakat dari rumah, sebab jaringan pipa air telah disambungkan langsung dari bak penampungan air menuju rumah-rumah warga. Kemudahan ini membuat warga tidak perlu lagi datang membawa jerigen air beserta gerobak pengangkutnya, tidak lagi antri menunggu giliran, dan tidak lagi merasakan beban tubuh yang lelah akibat aktivitas mendorong dan mengangkat air bersih ke dalam rumah. Kondisi ini sekiranya meringankan beban ganda para perempuan khususnya dalam mengelola air bersih untuk kehidupan rumah tangga.

Bantuan Pemerintah Kota Makassar yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan dalam menghadirkan sumber air bersih di RW 02 nampak dengan berdirinya bak besar penampungan air bersih yang pipanya telah disambungkan ke rumah-rumah warga. Meski air bersih dapat diakses langsung oleh warga dari rumahnya, namun, pemerintah setempat melakukan aturan atau jadwal pembagian distribusi air bersih melalui jam-jam tertentu kapan saja air akan mengalir ke rumah-rumah warga.

Kondisi serupa juga sama dengan yang ada di RW 04. Di tahun 2023, perusahaan Pelindo memberi bantuan CSR berupa penyediaan sumber air bersih lengkap dengan jaringan pipa air yang disambungkan langsung ke rumah-rumah warga. Inisiasi pengadaan sumber air berupa

sumur air bor dilakukan perintah wilayah RW 02 dengan alasan penting dan mendesaknya air bersih jika dibandingkan dengan bantuan lain yang bisa diperoleh dengan mudah oleh warga, tapi tidak untuk air bersih. Selain bantuan dari Perusahaan, ada juga bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di tahun 2020 berupa pengadaan air sumur bor yang dilengkapi dengan jaringan pipa air yang langsung disambungkan ke rumah-rumah warga.

Kedua jenis bantuan tersebut setidaknya menysasar beberapa rumah-rumah warga agar akses air bersih dapat diperoleh dengan mudah. Meski demikian, masih terdapat juga beberapa rumah warga yang tidak mendapatkan akses jaringan pipa air sehingga tetap menempuh pilihan mengangkut sendiri air bersih dari sumber air dengan menggunakan gerobak dan jerigen air. Tidak meratanya distribusi aliran pipa air dari bantuan sumber air bersih tersebut mengisyaratkan bahwa masih ada prasyarat dalam hal pemenuhan dasar masyarakat (air bersih) dan hak yang sama atas akses dan segala kebutuhan dasarnya.

Akses air bersih yang telah dirasakan di wilayah RW 04 dan RW 02 bukan berarti tanpa biaya. Pada bantuan sumber air bersih dari PUPR di RW 04, pipa air yang disambungkan ke rumah-rumah warga dikenakan biaya ± sebesar Rp. 200.000 per rumah. Biaya tersebut digunakan untuk pembelian hingga pemasangan pipa air ke rumah warga. Selain itu, setiap minggunya, warga juga dikenakan biaya sebesar Rp 10.000 untuk biaya pemeliharaan sumber air bersih.

Berbeda dengan bantuan sumber air bersih dari Pelindo, warga hanya dikenakan biaya sebesar Rp 10.000 per minggunya untuk pengelolaan dan pemeliharaan sumber air bersih. Beruntung, pemasangan jaringan pipa air ke rumah-rumah warga tidak dikenakan biaya. Kondisi ini sama dengan yang terjadi di wilayah RW 02. Bantuan sumber air bersih dari Pemerintah Kota Makassar bekerjasama dengan berbagai pihak tidak membebankan biaya pemasangan jaringan pipa air ke rumah warga. Warga hanya dikenakan biaya Rp 10.000 per minggunya untuk pemeliharaan saja.

Bagi warga yang tidak dialiri jaringan pipa air, mereka akan membeli air setiap harinya di tempat-tempat sumber air bersih yang ada di sekitar wilayahnya. Per gerobak yang biasanya memuat 10 jerigen air dengan rata-rata berisi 20 liter air per jerigen nya, dikenakan biaya sekitar Rp 3.000 bagi warga yang datang langsung mengambilnya. Namun, biaya lebih sekitar Rp 7.000 sampai 10.000 bagi mereka yang menggunakan jasa beli air (memakai jasa orang untuk mengangkut air ke rumah).

Tallo:

Perkampungan Sejarah yang Tenggelam dalam Ketiadaan Air



Sudah ada Banyak Program yang Masuk di Wilayah Kecamatan Tallo. Tapi Belum Ada yang Bisa Menyelesaikan Masalah Akut terkait dengan Krisis Air Bersih yang Dialami oleh Warga. Salah satunya program Jenne Tallasa pada tahun 2023 (Dokumentasi Warga, 2023)

Sebelum program PAMSIMAS, warga menggunakan air ledeng (PDAM) dan air sumur bor yang ada di rumah masing-masing. Tapi kondisi tersebut juga tidak berlangsung lama. Air ledeng yang sebagian diakses warga juga tidak mampu bertahan hingga akhirnya warga memilih untuk mencabut pemasangan mesin atau jaringan pipa PDAM akibat beban biaya yang tiap bulan harus dibayar sementara warga tidak mendapatkan air bersih.

Nasib yang sama juga berlaku untuk air sumur bor. Sebagian warga mengeluhkan kualitas air yang kurang baik. Air yang asin, berbau, dan keruh. Kedalam sumur bor juga hanya berkisar beberapa meter saja, sebab jika terlalu dalam, airnya akan semakin asin. Kualitas air sumur bor dipengaruhi oleh letaknya yang dekat dengan pesisir sungai dan laut. Meski masih ada warga yang menggunakan air sumur bornya, namun penggunaannya hanya sebatas aktivitas cuci dan

bersih-bersih seadanya. Warga tetap akan mengambil air bersih lainnya di sumber-sumber air atau dengan membelinya.

Sebenarnya, ada beberapa titik sumber air bersih di wilayah RW 05. **Pertama**, air sumur bor yang ada di kediaman Ketua RW. Bantuan air sumur bor di lokasi ini adalah salah satu yang terlama. Ketua RW selaku pengelola mengklaim bahwa air sumur bor yang ada di kediamannya beroperasi dengan baik selama kurun waktu 10 tahun. Bantuan tersebut berasal dari Kementerian PUPR yang distribusi airnya juga menggunakan jaringan pipa air yang bisa diakses ke rumah-rumah warga. Namun, dikenakan biaya sebesar Rp 500.000 untuk pemasangan pipa per rumah. Tarif itu membuat sebagian warga memilih untuk tidak menyambungkan pipa air ke rumahnya dan memilih untuk mengambil langsung dengan menggunakan gerobak dan jerigen air.

Seiring waktu, kini warga tidak lagi mengakses air sumur bor di kediaman Ketua RW 05. Kualitas airnya kurang baik dengan debit air yang juga semakin berkurang. Warga menyebut airnya asin dan keruh, beda dari yang sebelumnya. Kerusakan mesin akibat pengaruh endapan kapur di kedalaman sumur bor membuatnya tidak lagi berfungsi. Perbaikan dan bantuan pernah diupayakan, namun hasilnya tetap nihil. Kondisi ini membuat warga semakin kesulitan mengakses air bersih. Lokasi ke sumber air yang lain jaraknya cukup jauh. Saat ini, pihak RW 05 tengah menunggu alokasi bantuan sumber air bersih yang dijanjikan kembali oleh pihak PUPR.

Kedua, sumber air yang ada di RT B/2. Sumber air bersih ini dekat dengan situs budaya makam Raja-Raja Tallo. Disini, sumber air sumur bor berasal dari bantuan RISE (Pemerintah Australia). Terdapat bak penampungan air yang dilengkapi dengan kran air untuk memudahkan warga mengambilnya secara langsung. Namun, air tersebut hanya bisa diakses untuk beberapa warga saja berdasarkan data administratif yang sebelumnya disetor warga saat pendataan. Artinya aksesnya terbatas hanya untuk kelompok tertentu saja.

Ketiga, sumur umum yang berada di Kawasan Gudang Informa. Sumber air ini menjadi titik sentral yang selalu didatangi warga untuk mendapatkan air bersih. Sumur ini diklaim sebagai sumur tua yang mata airnya berada dalam wilayah Gudang. Meski musim panas tiba, air di sumur tetap ada walaupun debit airnya berkurang. Di sini, warga rela mengantri untuk mendapatkan air. Di sini pula, kerja keras warga sangat terlihat dalam upayanya memperoleh air. Tidak ada selang atau pipa, warga menggunakan timba untuk mengangkat air dari dalam sumur lalu dituangkan ke dalam jerigen air sampai penuh. Butuh tenaga dan waktu lebih untuk

warga mendapatkan air bersih yang akan dibawa pulang ke rumah

Di kedua wilayah RW tersebut, terdapat sumber air bersih yang dapat diakses langsung oleh masyarakat dari rumah, sebab jaringan pipa air telah disambungkan langsung dari bak penampungan air menuju rumah-rumah warga. Kemudahan ini membuat warga tidak perlu lagi datang membawa jerigen air beserta gerobak pengangkutnya, tidak lagi antri menunggu giliran, dan tidak lagi merasakan beban tubuh yang lelah akibat aktivitas mendorong dan mengangkat air bersih ke dalam rumah. Kondisi ini sekiranya meringankan beban ganda para perempuan khususnya dalam mengelola air bersih untuk kehidupan rumah tangga.

Bantuan Pemerintah Kota Makassar yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan dalam menghadirkan sumber air bersih di RW 02 nampak dengan berdirinya bak besar penampungan air bersih yang pipanya telah disambungkan ke rumah-rumah warga. Meski air bersih dapat diakses langsung oleh warga dari rumahnya, namun, pemerintah setempat melakukan aturan atau jadwal pembagian distribusi air bersih melalui jam-jam tertentu kapan saja air akan mengalir ke rumah-rumah warga.

Kondisi serupa juga sama dengan yang ada di RW 04. Di tahun 2023, perusahaan Pelindo memberi bantuan CSR berupa penyediaan sumber air bersih lengkap dengan jaringan pipa air yang disambungkan langsung ke rumah-rumah warga. Inisiasi pengadaan sumber air berupa sumur air bor dilakukan pemerintah wilayah RW 02 dengan alasan penting dan mendesaknya air bersih jika dibandingkan dengan bantuan lain yang bisa diperoleh dengan mudah oleh warga,

Harga Air Sumur Tua dengan Pemakaian Satu Gerobak/Hari	Pengeluaran Tiap Bulan untuk Membeli Air	Total Biaya yang Dikeluarkan Tiap Orang dalam Setahun untuk Membeli Air
Jika warga menimba dan mengambil sendiri air bersih di sumur tua maka tidak dipungut biaya	-	-
Jika menggunakan jasa angkut air maka warga akan membayar sekitar Rp. 10.000 untuk 12 jerigen berukuran 20 Liter (240 liter)	Rp. 300.000/rumah tangga	Rp. 3.600.000/rumah tangga

Estimasi Pengeluaran Air Bersih (Sumur Tua) tiap Rumah Tangga di Kampung Makam Raja-Raja Tallo dengan menggunakan jasa pengangkut. Jika tiap rumah tangga harus mengeluarkan uang minimal sebesar Rp. 300.000/bulan maka total biaya yang dihabiskan oleh seluruh rumah tangga (600 KK) untuk membeli air bersih tiap bulannya yakni sebesar Rp. 180.000.000 dan Rp. 2.160.000.000 (2,1 M) tiap tahunnya.



Warga di Perkampungan Raja-Raja Tallo yang Sedang Antri Mengambil Air Bersih di Sumur Tua. Sumur ini merupakan Sumber Air satu-satunya Warga yang dapat Diakses secara Gratis.

Air sumur dapat diakses warga tanpa biaya. Warga yang tidak bisa datang mengambil sendiri airnya, harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 10.000 per gerobak yang berisi 10 sampai 12 jerigen air bermuatan 20 liter, untuk jasa angkut air yang bisa dipesan ke orang-orang yang siap bekerja mengangkut air ke rumah. Jika warga membeli air dari jasa pengangkut sebesar Rp 10.000 untuk satu gerobak setiap harinya, maka dalam sebulan, beban biaya untuk air bersih adalah Rp 300.000. Hitungannya akan berbeda jika ternyata warga membeli lebih dari satu gerobak setiap harinya. Biaya itu belum termasuk biaya beli air ledeng atau air galon untuk kebutuhan lainnya setiap hari. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Misra bahwa

*Disini saya tinggal sama adik saya. Setiap hari dia beli air Rp 10.000 satu kali (satu gerobak). Biasa dua kali beli dalam sehari. Dia kan orang kerja, jadi tidak sempat pergi ambil-ambil air. Rata-rata per bulan uang airnya sekitar Rp 300.000. Kalau saya pergi ambil sendiri. Suami yang pergi ambil. Itu pun pinjam gerobak tetangga karena saya tidak punya gerobak. Kalau susah air di sana (sumur), kita pergi ambil lagi di tempat yang agak jauh. Biasa juga pakai motor pergi ambil air. **Ucap Ibu Misra kepada kami ketika mengunjungi rumahnya.***

Keempat, air sumur bor bantuan salah satu Calon Legislatif (Caleg) saat Pemilu 2024. Wilayah RT D/4 adalah penerima bantuan air sumur bor tersebut. Sumber air ini mulai beroperasi sejak akhir tahun 2023, beberapa bulan sebelum pemilu digelar. Janji Caleg memberi sumber air bersih nyatanya berbuah manis. Dukungan suara warga turut andil dalam perolehan kursinya. Warga pun merasa terbantu dengan keberadaan sumber air itu. Namun, tidak semua warga di RW 05 dapat mengakses air tersebut. Warga yang secara khusus memberi dukungan suara kepada Caleg tadi berhak mendapatkan akses air bersih. Mereka yang tidak memberi dukungan, otomatis tidak akan mengambil air di lokasi tersebut.

Harga Air (pemeliharaan) Sumur Bor bantuan Caleg dengan Pemakaian Satu Gerobak/Hari	Pengeluaran Tiap Bulan untuk Membeli Air	Total Biaya yang Dikeluarkan Tiap Orang dalam Setahun untuk Membeli Air
Warga yang memiliki akses di sumur bor ini akan dikenakan biaya sebesar Rp. 2.000	Rp. 60.000/rumah tangga	Rp. 720.000/rumah tangga-

Estimasi Pengeluaran Air Bersih (biaya pemeliharaan) tiap Rumah Tangga di Kampung Makam Raja-Raja Tallo dengan sumur bor bantuan caleg.

Akses air didapatkan warga dengan menggunakan gerobak air lengkap bersama jerigen nya. Dikenakan biaya sekitar Rp 2.000 untuk sekali ambil air. Biasanya, warga akan datang sebanyak dua (2) kali dalam sehari untuk mencukupi kebutuhan hariannya. Biaya itu digunakan oleh pengelola untuk membayar token listrik yang dipakai setiap kali mesin air dinyalakan. Warga yang mengambil air di lokasi ini juga tidak perlu susah payah mendapatkan air karena disediakan selang yang langsung dimasukkan ke dalam jerigen air tanpa perlu menimbanya.

Kelima, sumur-sumur pribadi milik warga yang masih menyimpan air. Sumber air ini tidak banyak dimiliki oleh warga. Meski dijumpai masih ada sumur yang menyimpan air dengan kualitas yang cukup baik, namun kedalamannya hanya berkisar ± 3 meter saja, dan digunakan untuk keperluan lain seperti air cucian saat sedang buang air (BAK/BAB). Untuk keperluan memasak, warga tetap pergi atau membeli air bersih lainnya. Ada pula warga yang masih memiliki sumur, namun kualitas airnya yang asin dan keruh membuatnya tidak lagi menggunakan sumur tersebut meski tersedia air di dalamnya.

Harga Air Ledeng/PDAM dengan Pemakaian Dua Jerigen/Tiga Hari	Pengeluaran Tiap Bulan untuk Membeli Air	Total Biaya yang Dikeluarkan Tiap Orang dalam Setahun untuk Membeli Air
Beberapa warga harus membeli air ledeng untuk keperluan memasak dengan biaya sekitar Rp. 1.000 per jerigen	Rp. 10.000/rumah tangga	Rp. 120.000/rumah tangga

Estimasi Pengeluaran Air Bersih (air ledeng/PDAM) tiap Rumah Tangga di Kampung Makam Raja-Raja Tallo dalam tiga hari sekali.

Dari kelima sumber air bersih yang ada di Perkampungan Makam Raja-Raja Tallo ini praktis hanya sumur tua yang menjadi satu-satunya sumber air bersama milik masyarakat di perkampungan ini. Karena beberapa sumber air yang disebutkan di atas hanya dapat dinikmati oleh sekelompok orang saja. Namun, apabila sumur tua sudah tidak dapat memenuhi air warga maka mereka terpaksa harus membeli air ledeng meskipun penggunaan air ini tidak sebanyak air sumur bor yang biasa digunakan warga. Beberapa warga yang menggunakan air ledeng untuk keperluan memasak akan membeli air ledeng sebanyak satu atau dua jerigen per 3 harinya. Harga air ledeng per jerigen nya sebesar Rp 1.000 atau Rp 2.000. Akses untuk mendapatkan air ledeng ditempuh dengan menggunakan motor sebab lokasinya cukup jauh dari rumah warga.



Kelangkaan Air Bersih dan Dampaknya terhadap Perempuan di Kecamatan Tallo

Krisis air yang terjadi di Kecamatan Tallo telah berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama. Tahunan bahkan puluhan tahun, warga dihadapkan pada kondisi buruknya kualitas dan kuantitas air, hingga beban hidup masyarakat pun bertambah akibat krisis air bersih. Implikasi krisis air yang terjadi di Tallo tidak saja menyebabkan masyarakat mengalami berbagai macam kesulitan, lebih dari itu, perempuan khususnya, mengalami beban ganda akibat akses air bersih yang tidak kunjung memadai. Sulitnya akses bersih membuat perempuan menghadapi berbagai dampak seperti ekonomi, kesehatan, hingga sosial budaya dalam kehidupannya sehari-hari.

Di Tallo, setiap harinya tanpa mengenal waktu, perempuan disibukkan dengan aktivitas mengambil air menggunakan gerobak berisikan beberapa jerigen air di atasnya. Tua muda tanpa kenal usia tidak punya banyak pilihan selain mengusahakan diri melakukan pemenuhan air bersih untuk keperluannya setiap hari. Tidak jarang pula, anak-anak ikut terlibat membantu orang tua mengambil air dan mendorongnya sampai ke rumah.

Proses pengambilan air yang dilakukan oleh perempuan dan juga anak-anak di Tallo telah berlangsung selama puluhan tahun. Tidak sedikit cerita tentang para ibu yang sedari kecil terbiasa ikut terlibat dalam pengelolaan air bersih mulai dari pengambilan hingga distribusi air dalam rumah tangga, hingga kini mereka telah memiliki cucu, namun tetap saja masih melakukan aktivitas mengangkut air dengan gerobak.

Pemandangan tersebut menjadi lumrah dan identik dengan kehidupan perempuan Tallo. Sulitnya akses air bersih di wilayah mereka telah menjadi kenyataan pahit yang dirasakan sampai hari ini. Seperti belum ada tanda dan titik terang kapan aktivitas pengangkutan air itu akan segera berakhir. Meski di beberapa titik telah ada bantuan sumber air bersih seperti sumur bor atau penampungan air, namun tetap saja, distribusinya belum langsung menjangkau rumah warga secara langsung dan penggunaanya juga terbatas.

Beban pengelolaan air di Kecamatan Tallo diidentikkan melalui keberadaan armada gerobak air yang mayoritas hampir dimiliki oleh warga sekitar. Bagi masyarakat, gerobak air adalah kendaraan wajib melebihi kendaraan yang lainnya. Sulit mendapatkan air bersih jika tidak memiliki gerobak air. Ketiadaan gerobak akan membuat masyarakat menyiapkan uang lebih banyak hanya untuk membeli air. Pilihan lain, meminjam gerobak tetangga meski dengan perasaan berat hati.

Intensitas pengambilan air bersih menggunakan gerobak air dilakukan para perempuan atau anak-anak minimal sekali dalam sehari, bergantung kebutuhan air dan jumlah anggota dalam keluarganya. Rata-rata setiap keluarga mengambil air sebanyak dua kali sehari yang digunakan sejak pagi hingga malam hari. Air bersih yang diambil tersebut digunakan untuk keperluan memasak, mandi, dan mencuci. Aktivitas itu belum termasuk bagi mereka yang harus membeli air bersih karena tidak ada anggota keluarga yang bisa mengambil air, tidak ada gerobak air, dan mereka yang bekerja seharian (tidak tinggal di rumah).



1**Krisis Air: Apakah Menjadi Masalah Perempuan ?**

Seorang Anak Perempuan yang sedang Mengantri Membeli Air Bersih untuk Memenuhi Kebutuhan keluarganya

Air adalah kehidupan. Bagi perempuan khususnya, air bukan saja soal kebutuhan dasar yang terikat dalam kehidupan sehari-hari, namun menjadi simbol tertentu yang menggambarkan potret atas segala hak-hak dasarnya sebagai manusia. Pemenuhan hak dasar seperti pendidikan, ekonomi hingga sosial politik memiliki hubungan dengan ketersediaan pemenuhan air yang berlangsung setiap harinya.

Krisis air bersih di dunia bukan hanya menjadi persoalan lingkungan hidup, tetapi juga persoalan sosial budaya yang memberi beban tersendiri bagi peran perempuan dalam keluarga. Perempuan harus dilibatkan dalam manajemen penyediaan dan pengelolaan air bersih keluarga karena merekalah yang paling terlibat dalam proses tersebut (Indraswari, 2021). Sudah menjadi rahasia umum bahwa ketidakamanan air, yang dipercepat oleh perubahan iklim, dialami oleh perempuan dengan cara yang spesifik gender (Tandon, I., Wallace, C., Caretta, AM., Vij, S., Irvine, A., 2024).

Pemandangan tersebut menjadi lumrah dan identik dengan kehidupan perempuan Tallo. Sulitnya akses air bersih di wilayah mereka telah menjadi kenyataan pahit yang dirasakan sampai hari ini. Seperti belum ada tanda dan titik terang kapan aktivitas pengangkutan air itu akan segera berakhir. Meski di beberapa titik telah ada bantuan sumber air bersih seperti sumur bor atau penampungan air, namun tetap saja, distribusinya belum langsung menjangkau rumah warga secara langsung dan penggunaanya juga terbatas.

Beban pengelolaan air di Kecamatan Tallo diidentikkan melalui keberadaan armada gerobak air yang mayoritas hampir dimiliki oleh warga sekitar. Bagi masyarakat, gerobak air adalah kendaraan wajib melebihi kendaraan yang lainnya. Sulit mendapatkan air bersih jika tidak memiliki gerobak air. Ketiadaan gerobak akan membuat masyarakat menyiapkan uang lebih banyak hanya untuk membeli air. Pilihan lain, meminjam gerobak tetangga meski dengan perasaan berat hati.

Intensitas pengambilan air bersih menggunakan gerobak air dilakukan para perempuan atau anak-anak minimal sekali dalam sehari, bergantung kebutuhan air dan jumlah anggota dalam keluarganya. Rata-rata setiap keluarga mengambil air sebanyak dua kali sehari yang digunakan sejak pagi hingga malam hari. Air bersih yang diambil tersebut digunakan untuk keperluan memasak, mandi, dan mencuci. Aktivitas itu belum termasuk bagi mereka yang harus membeli air bersih karena tidak ada anggota keluarga yang bisa mengambil air, tidak ada gerobak air, dan mereka yang bekerja seharian (tidak tinggal di rumah).

Data baru dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) menunjukkan bahwa masih adanya kesenjangan yang mencolok dalam akses terhadap air, sanitasi dan kebersihan (WASH), dengan beban berat yang ditanggung oleh perempuan dan anak perempuan (United Nation Water, 2023). Ketahanan air sangat bersifat gender di banyak negara, di mana tanggung jawab rumah tangga termasuk mengambil dan mengelola pasokan air rumah tangga serta mengurus keluarga, sebagian besar berada di tangan perempuan dan anak perempuan, meskipun tanggung jawab produktif lebih bersifat khusus (Doss, C., Meinzen-Dick, R., Quisumbing, A., & Theis, S., 2018).

Dalam konstruksi sosial masyarakat, krisis air adalah masalah pribadi bagi perempuan. Olehnya itu, para perempuan dianggap sebagai orang yang harus bertanggung jawab untuk menemukan sumber daya air yang dibutuhkan keluarga mereka untuk bertahan hidup, untuk minum, memasak, sanitasi dan kebersihan. Mereka mungkin mengantri dan menunggu air,

berjalan jauh untuk mengambil air, atau membayar mahal untuk mendapatkan air. Dalam upaya mereka mendapatkan air untuk keluarga, mereka seringkali menghadapi pilihan yang mustahil, kematian tanpa air atau kemungkinan kematian karena penyakit akibat air kotor.

Perempuan dan anak perempuan biasanya mempunyai tanggung jawab mengambil air. Ini bisa menjadi tugas yang berbahaya, memakan waktu dan menuntut fisik. Perjalanan jauh dengan berjalan kaki, seringkali lebih dari sekali sehari, dapat membuat perempuan dan anak perempuan rentan terhadap serangan dan sering kali menghalangi mereka untuk bersekolah atau mendapatkan penghasilan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh salah seorang perempuan yang kami temui yang menjelaskan bahwa

Saya itu jadwalku ambil air malam hari sudah magrib, setelah shalat magrib. Nanti setengah 10 malam baru pulangka. Biasa kalau saya pikir-pikir, saya capek, hampir 1 km saya tempuh untuk ambil air, capek jalan, sakit betisku. Kita mau pakai jasa beli air, tidak selamanya juga bisa langsung datang airnya karena tetap harus ngantri. Kan banyak orang yang mau ambil air. Ya Allah, air itu kebutuhan utama. Ucap Ibu Husnaini, Warga Kelurahan Tallo.



Sekelompok Perempuan di Tallo yang sedang Mengantri Air Bersih (Dokumentasi Warga, 2023)

Bagi Perempuan, sanitasi adalah tentang keselamatan pribadi. Kebutuhan pergi ke toilet di luar atau berbagi fasilitas dengan laki-laki dan anak laki-laki menempatkan perempuan dan anak perempuan pada peningkatan risiko pelecehan dan penyerangan. Perempuan dan anak perempuan mempunyai kebutuhan kebersihan yang spesifik. Diperlukan ruang yang bersih, fungsional, dapat dikunci, dan dipisahkan berdasarkan gender, dengan akses terhadap produk sanitasi dan sistem pembuangan untuk mengelola kebersihan menstruasi dan kehamilan. Kurangnya air dan sanitasi yang dikelola secara aman merupakan masalah kesetaraan. Perempuan dan anak perempuan paling terkena dampak buruknya layanan dan fasilitas air, sanitasi dan kebersihan. Namun, suara dan kebutuhan mereka sering kali tidak ada dalam rancangan dan implementasi perbaikan, sehingga membuat mereka terus terpinggirkan.

Akses terhadap air dan sanitasi adalah hak asasi manusia. Ketika perempuan tidak dapat menikmati hak-hak tersebut, kesehatan mereka akan sangat terpengaruh, sehingga membatasi peluang pendidikan dan ekonomi mereka, serta menghalangi mereka untuk berperan penuh dalam masyarakat. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Ibu Halija, berbagi kisah bagaimana perjuangan untuk mendapatkan air:

*Gara-gara air saya tidak tinggal lagi di rumahku. Dulu saya di RW 3. Hanya saya dan suami yang tinggal di rumah. Tapi sejak suami saya meninggal, tidak ada lagi yang ambil air. Jadi gara-gara air. Dulu disana air PDAM baik, mengalir, tapi hanya sebentar. Akhirnya kita ke Asrama Polisi minta-minta air. Saya dulu diajari, kalau mau dapat air 2 ember dalam sehari, harus bisa memikul. Jadi saya pakai sarung untuk memikul. Ternyata benar bisa dapat 2 ember. Tapi saat pertama kali belajar memikul air, banyak yang terbuang airnya. Kami baru tenang kalau datang musim hujan. Saya tidak tinggal disana lagi, rumah itu sudah saya jual. Andai bukan karena masalah air, saya akan tetap disana, meskipun sendiri. Tapi siapa lagi yang mau pergi ambil air, suami saya sudah tidak ada. Jaraknya jauh, pakai motor ambil airnya. Dan airnya dipakai saja untuk masak. **Jelas Ibu Halija kepada kami.***

Pengalaman Ibu Halija adalah satu dari sekian banyak perempuan di Tallo dengan kisah yang sama. Kesamaan atas nasib sulitnya akses terhadap air bersih yang telah dirasakan dalam waktu yang lama membuat perempuan seolah terbiasa menerima beban ganda dalam kehidupannya. Peran lebih perempuan menuntutnya terlibat penuh dalam setiap upaya pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Kondisi berat akan jauh diterima manakala anggota

keluarga lain (baca: suami atau anak) tidak bisa berbagi peran pengadaan air bersih di rumah. Kesibukan suami yang bekerja di luar rumah tidak menjadikannya bertanggung jawab atas peran pengadaan kebutuhan air bersih. Perempuan lah yang sebagian besar menanggung beban ganda atas persoalan akses air.

2 **Dampak Krisis Air Terhadap Perempuan di Kecamatan Tallo**

Akses terhadap air bersih dapat melindungi dan menyelamatkan nyawa, hanya karena air tersebut tersedia. Akses terhadap air bersih mempunyai kekuatan untuk mengubah waktu yang dihabiskan menjadi waktu yang dihemat, ketika waktu itu dekat dan bukan beberapa jam lagi. Akses terhadap air bersih dapat mengubah permasalahan menjadi potensi: terbukanya pendidikan, kesejahteraan ekonomi, dan peningkatan kesehatan.

Kelangkaan air menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap perempuan dan anak-anak karena merekalah yang sering kali bertanggung jawab untuk mengumpulkan air. Jika jarak air lebih jauh, maka dibutuhkan lebih banyak waktu untuk mengumpulkannya, yang berarti lebih sedikit waktu untuk bekerja atau ke sekolah. Khususnya bagi anak perempuan, kekurangan air di sekolah berdampak pada pendaftaran, kehadiran, dan kinerja siswa. Membawa air dalam jarak jauh juga merupakan beban fisik yang sangat besar dan dapat membuat anak-anak terkena risiko keselamatan dan eksploitasi.

Kelangkaan air membatasi akses terhadap air bersih untuk minum dan melakukan praktik kebersihan dasar di rumah, sekolah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan berbagai fasilitas umum lainnya. Ketika air langka, sistem pembuangan limbah bisa rusak dan ancaman tertular penyakit seperti kolera meningkat. Air yang langka juga menjadi lebih mahal.

Perempuan kelompok miskin dan terpinggirkan berada di garis depan dalam setiap krisis kelangkaan air, yang berdampak pada kemampuan mereka untuk menjaga kesehatan, melindungi keluarga, dan mencari nafkah. Bagi banyak perempuan dan anak perempuan, kelangkaan air berarti pengumpulan air yang lebih melelahkan dan memakan waktu, sehingga menempatkan mereka pada peningkatan risiko serangan dan seringkali menghalangi mereka untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan.

Rentetan dampak kelangkaan air bersih adalah ancaman bagi keberlangsungan hidup terutama perempuan. Air yang langka menjadikan perempuan sebagai komunitas yang paling

terdampak merasakan segala beban hidup di lingkungan keluarga. Tidak saja menjadi pengelola dan pengendali kebutuhan air, perempuan memainkan peran lebih besar ketimbang anggota keluarga lainnya. Tanpa akses air memadai, sulit bagi perempuan memastikan segala kebutuhan dalam rumah tangganya terpenuhi.

Berdasarkan Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan bersama dengan para perempuan di tiga Kelurahan (Tallo, Kaluku Bodoa, Buloa) di Kecamatan Tallo, WALHI Sulawesi Selatan berhasil mengidentifikasi sejumlah dampak yang dialami oleh perempuan akibat dari krisis air yang secara detail tergambarkan sebagai berikut:

Kelurahan Tallo	Kelurahan Kaluku Bodoa	Kelurahan Buloa
Dampak Ekonomi		
Mata pencaharian sebagian besar warga di Kelurahan Tallo adalah buruh harian atau buruh pabrik dan juga nelayan. Pendapatan pun tidak menentu, akibatnya, para perempuan memilih untuk mengangkut air ketimbang membeli. Akan tetapi ketika dalam keadaan terdesak, mereka pun harus mengeluarkan uang untuk membeli air bersih dan pengeluaran ini menjadi beban ekonomi tersendiri bagi warga.	Krisis air membuat masyarakat khususnya perempuan di Kelurahan Kaluku Bodoa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memenuhi kebutuhan air bersih dalam kehidupan sehari-hari. Tambahan beban biaya untuk membeli air bersih dirasa berat oleh perempuan mengingat pendapatan keluarga yang umumnya hanya bekerja sebagai buruh harian semakin menyulitkan perekonomian keluarga. Tidak hanya itu, Perempuan juga mengeluhkan biaya air yang cukup besar yang tidak dibarengi dengan bertambahnya pendapatan ekonomi keluarga.	Di Kelurahan Buloa, pemenuhan atas air bersih ditempuh dengan cara membeli air. Kondisi ini sudah dialami oleh warga sejak bertahun-tahun. Situasi ini begitu sulit dirasakan oleh para perempuan yang tinggal di Kelurahan Buloa dimana pendapatan utama keluarga mereka hanya mengandalkan upah sebagai buruh harian dan industri.
Dampak Kesehatan		
Di Kelurahan Tallo, perempuan adalah aktor utama penyedia air dalam rumah tangga. Suami yang pergi bekerja membuat perempuan lebih banyak waktu untuk bisa mengakses air bersih. Mendorong gerobak, menimba air, hingga menuangkannya ke dalam penampungan di rumah adalah kebiasaan sehari-hari yang melekat dalam kehidupan perempuan di Tallo. Akibatnya, rasa lelah dan sakit badan kerap kali dialami perempuan. Lamanya rentan aktivitas mengambil air dengan menggunakan gerobak berimplikasi pada semakin banyak pula perempuan yang saat memasuki usia tua, tidak lagi sanggup bekerja lebih akibat kondisi kesehatan tubuh yang semakin menurun.	Kualitas air sumur di Kelurahan Kaluku Bodoa (khususnya yang berada di rumah warga) cenderung bau, keruh, dan asin, menimbulkan masalah kesehatan seperti gatal-gatal pada kulit. Beberapa perempuan mengeluhkan kualitas air yang buruk yang ada di rumah masing-masing, namun, masih tetap menggunakannya sebab akses air bersih yang cukup jauh dan mengeluarkan biaya. Selain itu, ada juga warga yang kerap mengeluhkan sakit pada fisik karena aktivitasnya mengangkut air bersih setiap hari.	Jarak jauh yang harus ditempuh oleh para perempuan untuk mengambil air bersih, membuat sebagian besar dari mereka mengalami kelelahan fisik. Selain itu, perempuan di Buloa juga sangat berhati-hati untuk mengambil air yang letaknya di jalan utama Kecamatan Tallo, sebab jalan utama tersebut kerap dilalui kendaraan besar yang keluar masuk ke pelabuhan Makassar New Port.

Dampak Sosial

Krisis air bersih di Kelurahan Tallo memicu ketegangan di antara perempuan saat sedang berupaya mendapatkan air bersih. Kondisi ini biasa dipicu saat para perempuan berebut (tidak ingin menunggu lama) tiap kali bantuan air bersih datang ke wilayah mereka. Akibatnya, ketegangan baik non fisik (adu mulut) hingga fisik (saling mendorong hingga berkelahi) kerap tidak terhindarkan. Hal-hal tersebut juga berdampak semakin renggangnya kekerabatan di antara perempuan yang terus berlanjut.	Intensitas dan waktu kerja perempuan di Kelurahan Kaluku Bodoa semakin berkurang. Dimana seharusnya mereka banyak memiliki waktu luang, namun karena harus mengantri di subuh hari untuk membeli air makanya waktu menjual dan mengurus anak menjadi tertunda. Olehnya itu, menurut mereka, perempuan di Kaluku Bodoa baru bisa bergerak ketika air di rumah sudah terisi dan begitupun sebaliknya.	Dampak sosial akibat krisis air di Kelurahan Buloa ini adalah munculnya potensi konflik antar sesama warga yang memperebutkan akses air bersih. Selain itu, munculnya kecemburuan sosial akibat dari distribusi air yang tidak merata di kelurahan ini.
--	---	---

Dari hasil FGD yang telah dilakukan, WALHI Sulawesi Selatan menemukan beberapa dampak yang dirasakan perempuan di Kecamatan Tallo (Kaluku Bodoa, Tallo, dan Buloa) sebagai akibat dari krisis air yang mereka alami. Adapun ke enam dampak yang dirasakan yakni sebagai berikut (1) adanya pengeluaran tambahan untuk membeli air bersih; (2) banyak perempuan yang menyatakan bahwa mereka mengalami kelelahan fisik dan pikiran; (3) gangguan penyakit kulit; (4) memicu konflik atau ketegangan; dan (5) memunculkan kecemburuan dan kecurigaan antar sesama warga; dan (6) waktu luang yang berkurang.

Apa yang dialami oleh para perempuan di Kecamatan Tallo merupakan bentuk akumulasi dari krisis air yang mereka alami. Krisis air bersih membuat sebagian besar beban kerja dalam rumah tangga akan bertumpu pada perempuan, apalagi ibu rumah tangga dengan peran ganda yang harus dijalankan bersamaan setiap harinya. Wilayah domestik yang selalu dicirikan dan dipersepsikan secara kultur sebagai wilayah dominan perempuan seringkali berakibat pada peran ganda yang membutuhkan lebih banyak tenaga, pikiran, waktu, dan juga biaya. Kondisi ini menimbulkan kerentanan pada perempuan sebagai korban paling terdampak dari permasalahan krisis air bersih.





Privatisasi Air dan Pengabaian Negara terhadap Pemenuhan Hak atas Air bagi Warga di Kecamatan Tallo

Saat ini kita sedang menghadapi krisis air yang dapat dilihat dan dirasakan dalam berbagai situasi. Hal ini dinyatakan secara langsung oleh Audrey Azoulay (Direktur Jenderal UNESCO) dalam laporan PBB tentang Perkembangan Sumber Daya Air 2024 (United Nations World Water Development Report) yang diterbitkan oleh UNESCO menjelaskan bahwa

di satu sisi terdapat wilayah yang mengalami banjir dan ancaman tenggelam semakin meningkat. Di sisi lain separuh populasi dunia menghadapi krisis ketersediaan air, antara tahun 2002 dan 2021 kekeringan berdampak terhadap 1,4 miliar orang dan menyebabkan kematian hampir 21.000 jiwa. Audrey Azoulay, selaku Direktur Jenderal UNESCO.

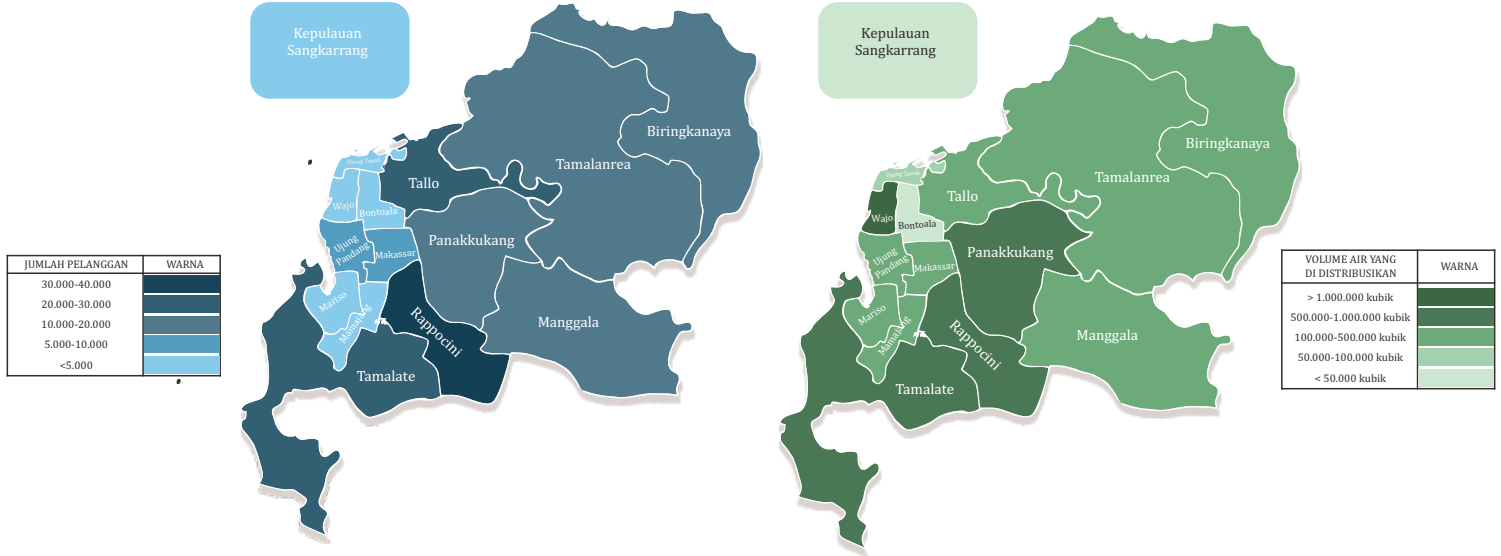
Tidak hanya itu, dalam narasi RPJMN 2020-2024 telah memperkirakan akan adanya kelangkaan air baku. Prakiraan ini bisa dilihat dari luas wilayah kritis air yang semakin meningkat dari 6% tahun 2000 menjadi 9,6% di tahun 2045. Ketersediaan air yang semakin mengalami krisis disebabkan oleh berbagai macam faktor, luasan tutupan hutan yang semakin rendah akibat aktivitas industrialisasi, perubahan iklim global yang menerpa sebagian besar wilayah Indonesia serta tata kelola air dan sumber-sumber air. Dampak tersebut sangat terasa dialami oleh warga perkotaan, khususnya masyarakat miskin kota yang masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

1

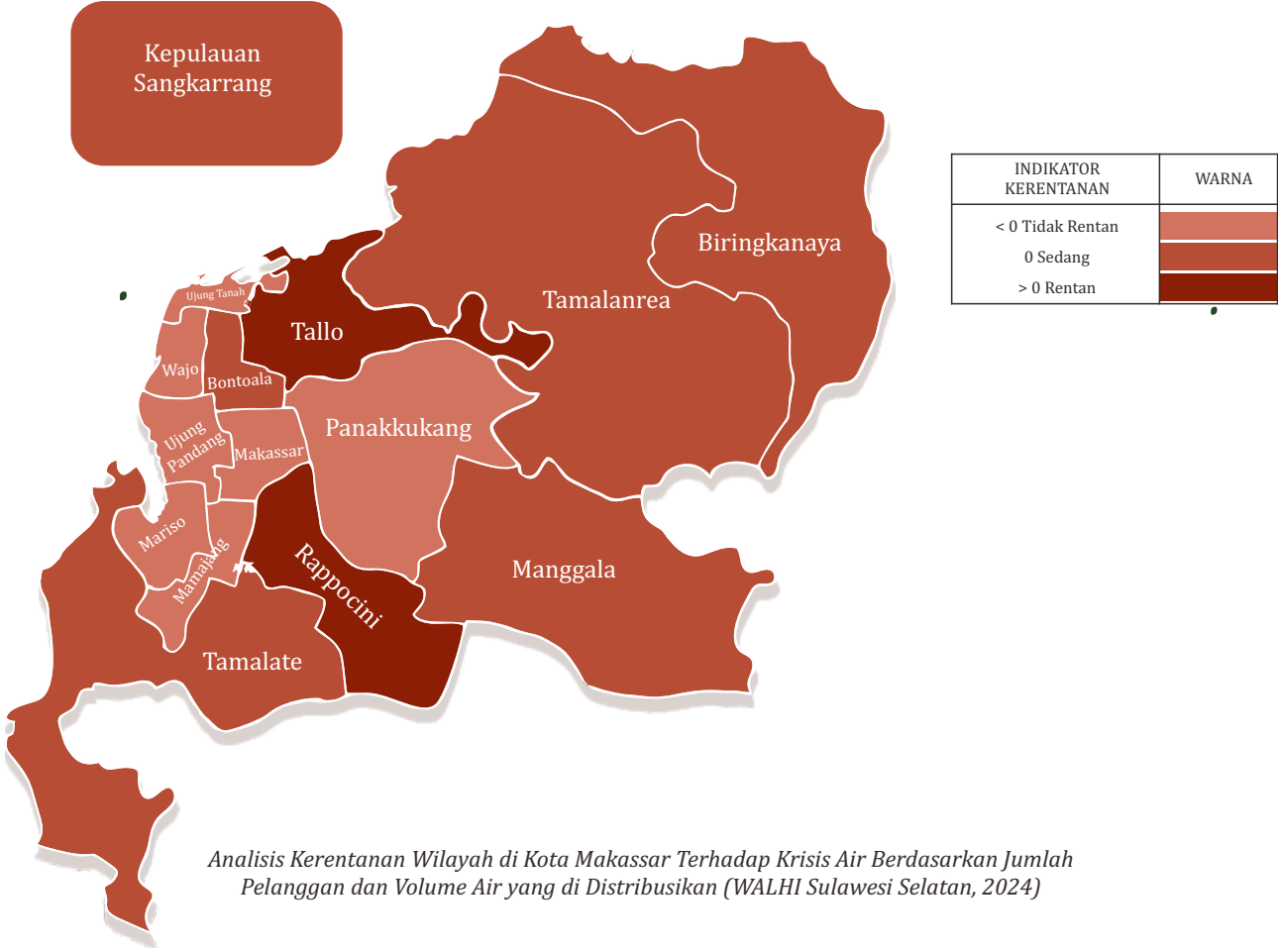
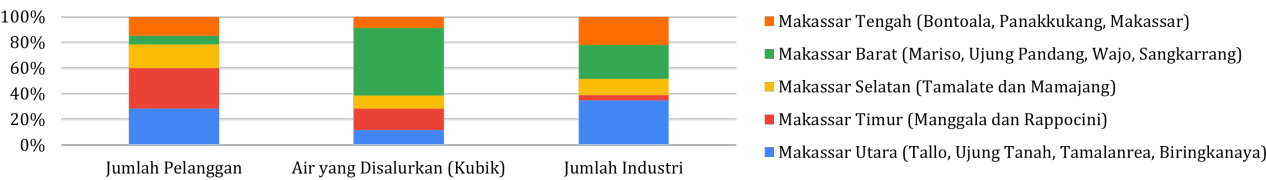
Warga Kesulitan, Pengusaha Untung:

Potret Ketimpangan dan Privatisasi Air Di Kota Makassar

Makassar sebagai Kota warisan kolonial, meninggalkan jejak bangunan yang hingga hari ini masih berdiri kokoh, salah satunya Instalasi Pengolahan Air (IPA) I Ratulangi yang didirikan sejak tahun 1924 oleh Pemerintah Hindia Belanda. Ditengah arus migran yang melanda Kota Makassar serta urbanisasi sebagai sebuah proses dalam dinamika masyarakat modern, perlu ditopang dengan infrastruktur yang memadai, termasuk infrastruktur dalam pelayanan akses air bersih. Hingga saat ini Kota Makassar memiliki lima Instalasi Pengolahan Air (IPA), yaitu IPA I Ratulangi, IPA II Panaikang, IPA III Antang, IPA IV Maccini Sombala dan IPA V Somba Opu.



Persentase Penggunaan Air dan Sebaran Industri di Kota Makassar



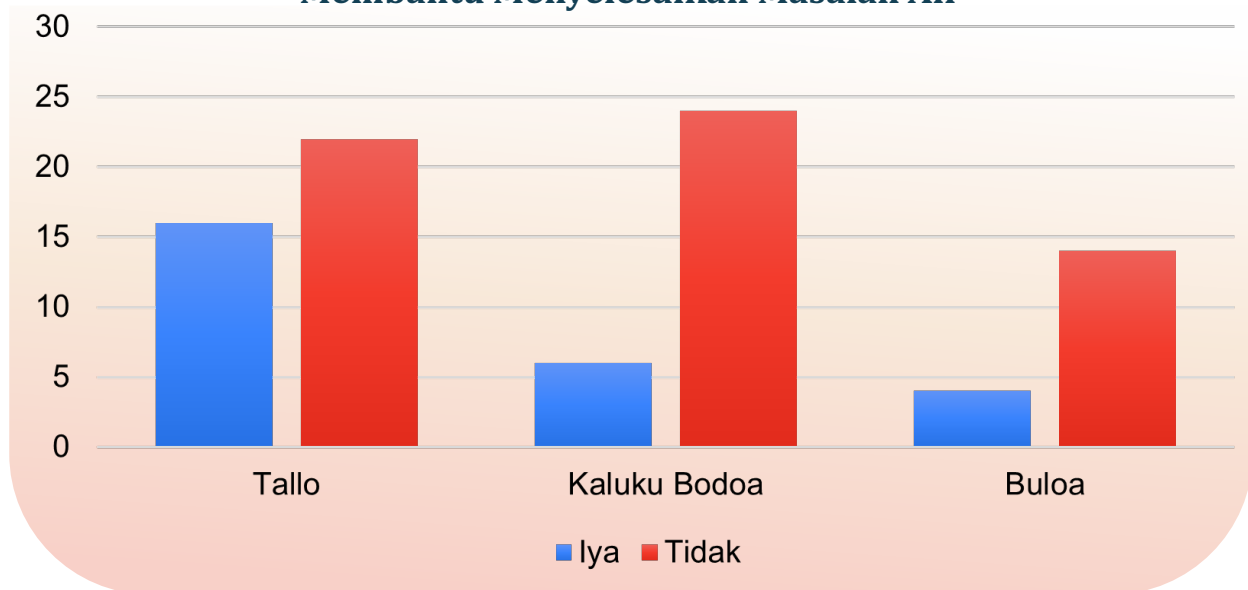
Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Kota Makassar (2024) menunjukkan bahwa saat ini jumlah pelanggan air bersih di Kota Makassar pada akhir tahun 2023 adalah sekitar 181.691 pelanggan dengan total air yang disalurkan yakni sebesar 7.950.442 kubik. Dari data pelanggan PDAM tersebut, ternyata hanya sekitar 40,6 % dari total jumlah kepala keluarga yang ada di Kota Makassar yang terdaftar dan mendapatkan air bersih dari PDAM Makassar. Tentu saja angka ini sangatlah rendah, terlebih lagi jika dibandingkan persentase jumlah pelanggan dan air yang disalurkan.

Untuk melihat ketimpangan pembagian air bersih di Kota Makassar, kami membagi wilayah Makassar menjadi lima wilayah yang terdiri dari utara, timur, selatan, barat, dan tengah. Hasilnya, Makassar bagian barat memiliki volume air yang disalurkan paling banyak meskipun memiliki pelanggan yang sedikit. Sedangkan Makassar Utara, memiliki banyak pelanggan PDAM namun volume air yang disalurkan sangat sedikit.

Dari data di atas menunjukkan bahwa telah terjadi ketimpangan atas akses air bersih yang tersalurkan, dimana data menunjukkan bahwa Makassar Utara dengan jumlah pelanggan dan industri yang cukup banyak ternyata justru menerima air dari PDAM Kota Makassar dengan jumlah yang sedikit. Kondisi tersebut sangat berbeda dengan beberapa kecamatan yang masuk dalam wilayah Makassar Barat dimana jumlah pelanggan sedikit dengan jumlah industri yang besar tapi volume air yang disalurkan sangatlah fantastis.

Permasalahan air bersih sejatinya tidak hanya berbicara soal ketimpangan distribusi saja, tetapi juga menyangkut soal privatisasi. Dimana akar dari permasalahan ini adalah munculnya pandangan mengenai air sebagai nilai tukar bukan lagi menjadi nilai guna. Persoalan memandang air dari aspek nilai guna atau nilai tukar telah mewacana pada tahun 2003 tepatnya di pertemuan Forum Air Sedunia (World Water Forum) yang diadakan di Jepang. Saat itu, terjadi debat antara dua kelompok ideologis, dimana kelompok pertama memandang air sebagai "Hak Asasi Manusia" (Right To Water) yang di dalamnya terdapat nilai guna. Sedangkan kelompok kedua memandang air sebagai "Water Right", air sebagai nilai tukar yang berorientasi terhadap kepentingan pasar atau kepentingan ekonomi semata. Sederhananya, perubahan nilai air dari nilai guna menjadi nilai tukar, sejatinya merupakan bentuk dari gejala yang disebut privatisasi.

Bantuan Air Bersih Musiman Dapat Membantu Menyelesaikan Masalah Air



Sebagian besar warga di tiga kelurahan menganggap bahwa bantuan musiman tidak dapat menyelesaikan masalah air bersih yang mereka alami. Bantuan-bantuan ini biasanya dari pemerintah ketika warga mengalami kekeringan ekstrim atau saat adanya pemilihan kepala daerah maupun anggota DPRD

Privatisasi bisa dimaknai sebagai keterlibatan sektor swasta, pemodal dan para pebisnis dalam isu publik. Air sebagai hal mendasar yang sifatnya bisa diakses publik, namun dalam tata cara kelolanya peranan tersebut diambil alih oleh para pebisnis. Negara selalu memposisikan masyarakat sipil dan pasar atau pemodal dalam garis yang setara, tentu akan terjadi kesenjangan yang begitu tajam. Pengusaha atau para pebisnis khususnya yang melihat air sebagai sebuah komoditas, punya kemudahan akses terhadap kekuasaan ditopang dengan modal yang mapan. Sedangkan warga sipil, khususnya masyarakat miskin perkotaan dengan pendapatan ekonomi yang tak menentu mengalami kesulitan dalam mengakses air bersih. Akses dan keterlibatan masyarakat miskin kota dengan kekuasaan atau para pejabat publik cenderung dimonopoli demi kepentingan politik elektoral yang dijalankan lima tahun sekali dengan cara-cara pragmatis.

Tak heran jika masuk musim pemilu maupun pilkada, para politisi serta relasinya membagikan air demi kepentingan politik praktis mereka. Air dinilai sebagai komoditas politik yang memiliki daya jual ditengah masyarakat, apalagi bagi masyarakat yang mengalami kesulitan akses air bersih. Inilah siklus yang mudah kita jumpai belakangan ini ketika musim kemarau melanda Kota Makassar. Kehadiran para pejabat dan politisi di tengah krisis air yang

dialami warga miskin Kota Makassar, sama sekali tidak menjawab akar persoalan. Dengan cara menjadikan air sebagai komoditas politik justru akan semakin memicu konflik horizontal ditengah masyarakat.

Lantas, seperti apa permasalahan privatisasi air di Kecamatan Tallo. Di kecamatan ini, Kehadiran PAMSIMAS di tengah krisis air bersih yang dialami warga Kota Makassar ,sedikit banyak turut membantu kehidupan warga, walaupun dalam tata kelolanya mengalami kendala serta problem. Program PAMSIMAS yang mendapat dukungan pendanaan dari Bank Dunia dijadikan sebagai alternatif ditengah keterbatasan PDAM. Awalnya program ini diharapkan mampu mendorong tingkat partisipasi warga dalam akses sumber air bersih. Namun dalam beberapa fakta dan praktiknya di lapangan, keterlibatan beberapa aktor tidak sejalan dengan semangat partisipatif program demi meningkatkan akses air bersih dan sanitasi. Hal semacam ini diperparah lagi dengan adanya kecenderungan untuk mendominasi program PAMSIMAS oleh kelompok elit, baik dalam skala RT/RW ataupun tokoh masyarakat yang dianggap memiliki peran sentral dalam lingkungannya.

Ketimpangan akses air bersih menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat miskin Kota yang berada di Kecamatan Tallo Kota Makassar. Di tengah ratusan bahkan ribuan kepala keluarga (KK) Kecamatan Tallo yang kesulitan akses air bersih, namun masih terdapat kelompok elit yang menjadikan air sebagai barang dagangan demi meraup keuntungan. ini dikarenakan jangkauan layanan PDAM belum tersebar merata di wilayah pinggiran seperti Kecamatan Tallo. Padahal, para pengusaha air ini juga menggunakan air dari PDAM lalu kemudian menjualnya kembali ke masyarakat yang tidak memiliki jaringan atau modal dalam mengakses air bersih. Bahkan, lebih parahnya lagi, salah seorang warga pernah berucap bahwa

Disini air PDAM tidak sampai di rumah, tapi lebih banyak ke pabrik. Orang pabrik itu bisa dapat air dari PDAM karena ada kenalan. Kita orang kecil, tidak punya kenalan. Jadi harus selalu beli air PDAM yang dijual sama orang-orang disini, Ucap salah seorang Perempuan di Kecamatan Tallo yang tengah menunggu antrian air bersih.

2

Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Air

Sejatinya negara harus hadir dalam mengurai dan menyelesaikan masalah akses dan privatisasi air bersih yang terjadi di Kecamatan Tallo. Sebab hal ini sesuai dengan pembukaan UUD 1945, secara tegas dinyatakan bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum serta keadilan sosial, maka Negara perlu melindungi segenap bangsa yang didalamnya melekat warga negara maupun masyarakat. Sebab takkan ada negara jika tak ada warga negara. Jauh sebelum ada negara, warga negara sudah lebih awal mengakses sumber-sumber kehidupan demi keberlangsungan hidup, termasuk sumber daya air.

Negara hadir dengan segenap aparatur dan perangkat kebijakannya untuk mengukur serta mengelola sumber-sumber air secara berkeadilan. Seperti yang tergambar dalam Undang-Undang 1945 Pasal 33 ayat 3, bahwa air sebagai bagian dari sumber daya alam, merupakan cabang produksi penting serta vital yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, kenyataannya hari ini pemaknaan “Hak Menguasai” oleh negara sering kali disalah artikan sebagai “Hak Milik” oleh negara atas sumber daya alam termasuk sumber daya air yang berada di Indonesia.

Indonesia sebagai sebuah negara berkembang telah mengadopsi atau meratifikasi beberapa produk hukum internasional tentang HAM, sebagai sebuah komitmen yang sifatnya formal prosedural untuk pemajuan HAM. Di tahun 2005 Indonesia mengesahkan kovenan Sipol dan Ekosob sebagai sebuah produk Undang-Undang dalam negeri yang kita kenal dengan UU 11 Tahun 2005 dan UU 12 Tahun 2005. Sikap tersebut perlu diejawantahkan oleh negara dalam wujud yang konkrit, sebagai sebuah keberpihakan yang nyata terhadap pemajuan HAM di Indonesia, terutama Hak Atas Air bagi masyarakat miskin.

Pelibatan Perencanaan Air



Sebagian besar warga di tiga kelurahan tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan air bersih

Komentar Umum No. 15 Komite PBB Dewan Ekonomi, Sosial dan Budaya tentang Hak Atas Air menegaskan, Hak asasi manusia atas air sangat diperlukan, untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Hal ini merupakan prasyarat untuk mewujudkan hak asasi manusia lainnya. Hak atas air sebagai hak setiap orang atas air yang cukup, aman, dapat diterima, dapat diakses secara fisik dan terjangkau untuk kebutuhan hidup. Dalam Hak Asasi Manusia, Negara Indonesia sebagai pemangku kewajiban, sedangkan warga negara sebagai pemangku hak. Maka negara perlu memastikan bahwa hak warga negara atas air perlu dihormati, dilindungi serta dipenuhi. Sebab diamnya negara atau mengabaikan hak atas air terhadap masyarakat miskin terutama yang berada di kota, bagian dari pelanggaran HAM.

Sehubungan dengan hal di atas, secara gamblang dijelaskan bahwa hak atas air merupakan dimensi hak yang bersumber dari hak atas standar kehidupan yang layak dan hak atas kesehatan. Hal yang sama juga dijelaskan dalam Kovenan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah diadopsi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang 11 Tahun 2005. Negara Pihak dan Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya termasuk, pangan, sandang dan papan demi perbaikan kondisi hidup terus menerus.

Namun, pada prakteknya beberapa kebijakan pun saling bertolak belakang, di satu sisi mengakui adanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas air bagi masyarakat miskin, namun dilain sisi air dan sumber-sumber air diberikan keleluasan terhadap pasar untuk tata kelolanya. Sehingga menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial ditengah masyarakat akibat pengabaian negara terhadap hak atas air bagi masyarakat miskin. Negara tak boleh netral apalagi diam dalam pemenuhan hak atas air, sebab ia menjadi tanggung jawab yang harus diberikan oleh negara. Jika hal semacam ini diabaikan dan dibiarkan secara terus menerus, maka kelangsungan hidup akan mengalami ketimpangan, ada yang krisis air, sedangkan ada pula yang menjadikan air sebagai komoditas demi kepentingan ekonomi semata. Parahnya lagi, keterlibatan warga di tiga kelurahan dalam merencanakan persoalan air bersih sangatlah minim.

Kecenderungan negara melihat air sebagai sebuah komoditas, tak lepas dari cara pandang neoliberalisme. Negara memberikan kebebasan pasar dalam mengelola sumber daya air, dengan harapan agar meningkatkan kesejahteraan warga. Namun logika tersebut tampaknya rawan krisis dan menimbulkan ketimpangan. Sebab orientasinya adalah mendapatkan

keuntungan sebesar-besarnya, siapa yang punya kuasa atas modal, dialah yang mampu mengakses air serta sumber-sumber air. Sayangnya, negara dengan aparatur dan instrumen perangkat kebijakannya turut melanggengkan hal tersebut, inilah yang disebut Ideologi State Apparatus. Seharusnya, kehadiran negara dipahami sebagai pengelola hak terutama hak atas air yang tidak seimbang, timpang dan tidak adil. Prinsipnya, negara harus membantu warga negara terutama masyarakat miskin yang selama ini minim akses untuk mendapatkan haknya atas air.

KESIMPULAN

Kurang lebih dua puluh tahun lamanya, warga yang tinggal di pesisir utara Kota Makassar tepatnya di Kecamatan Tallo mengalami krisis air bersih. Apa yang dialami oleh ribuan warga yang tinggal di Tallo merupakan sebuah kenyataan pahit di tengah gembar-gembor pemerintah yang menyerukan Kota Makassar sebagai Kota Dunia dan Paling Bahagia. Sungguh sebuah ironi. Pasca melakukan penelitian lapangan selama kurang lebih empat bulan lamanya, WALHI Sulawesi Selatan menemukan berbagai permasalahan yang saling terhubung dan terikat dengan permasalahan krisis air yang dialami oleh warga di tiga kelurahan (Tallo, Buloa, dan Kaluku Bodoa).

Beberapa rentetan permasalahan ini yakni sebagai berikut: (1) Pertumbuhan kota yang semakin masif membuat laju industrialisasi juga semakin ekspansif, bahkan tidak banyak wilayah-wilayah industri dan perumahan elit berada di tanah yang dulunya merupakan kawasan resapan air atau Ruang Terbuka Hijau (RTH); (2) Dipengaruhi oleh DAS yang tutupan hutannya di bawah angka 30%, dimana hal ini membuat Kota Makassar akan mengalami banjir ketika musim penghujan dan kekeringan saat musim kemarau; (3) Krisis air bersih memberi dampak ekonomi, sosial, hingga permasalahan kesehatan terhadap warga yang ada di Kecamatan Tallo khususnya kelompok perempuan; dan (4) Krisis air yang dialami oleh ribuan warga di Kecamatan Tallo bukan disebabkan oleh permasalahan teknis perpipaan, tetapi lebih kepada persoalan akses dan distribusi yang timpang. Artinya, permasalahannya lebih mengarah ke masalah struktural ketimbang teknologi.

Pada intinya, berkurangnya ruang untuk air juga disebabkan oleh termutilasinya tata kelola air. Air tidak dikelola sesuai dengan siklus hidrologis tetapi dikelola berdasarkan daerah wilayah administratif atau bersifat sektoral. Lebih lanjut, jika air juga sudah dikavling-kavling alokasinya dan dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan atau ruang untuk air juga dialihkan untuk aktivitas lain, maka ketahanan air (water security) bisa terancam. Dan gambaran inilah yang menjadi penyebab mengapa warga di utara pesisir Kota Makassar mengalami krisis air selama bertahun-tahun.



“

*Makassar
Kota D
yang Kris
Air*



ur
Dunia
sis

”

DAFTAR PUSTAKA

Amalinda Savirani, Wijanto Hadipuro Dias Prasongko, dkk. (2024). *Macetnya Air Kami, Gerakan Warga dan Akses Air Bersih di Indonesia*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press

Alimuddin, Bayuaji, Sumantyo, dan Kuze. 2010. Integrated Analysis of Quickbird and JERS-1 SAR data for land subsidence study in the City of Makassar.

Doss, C., Meinzen-Dick, R., Quisumbing, A., & Theis, S. (2018). Women in agriculture: Four myths. *Global Food Security*, 16, 69–74. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2017.10.001>

Hasyim Wahid. (1999). *Telikungan Kapitalisme Global Dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia*. Yogyakarta. LKIS

Invanni, Nasiah, Jaya. 2023. Pendugaan Potensi Air Tanah dengan Metode Geolistrik Untuk Penyediaan Air Bersih di Kota Makassar. *Jurnal Environment Science*. Vol (5): 178-192.

IPCC Technical Paper VI. 2008. *Climate Change and Water*. Intergovernmental Panel on Climate Change.

Kota Makassar dalam Angka. 2024. Badan Pusat Statistik: Kota Makassar.

Limuris Cakrafaksi, F. (2021). Hak Rakyat Atas Air Bersih Sebagai Derivasi Hak Asasi Manusia Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. *Jurnal Jentera* Volume 4, No. 2

Mokh Sobirin. Muhammad Nurkhoiron, dkk. (2010). *Bencana Industri : Relasi Negara, Perusahaan dan Masyarakat Sipil*. Depok. Desantara Foundation

Makkelo, Daeng Ilham. 2018. Menjadi Kota Modern: Transformasi Kota Makassar pada Abad ke-20. *Jurnal Sejarah*. Vol. 1(2): 46-64.

M. Subhi Azhari, Muhammad Hafiz, Nurun Nisa. (2015). *Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Kewarganegaraan Untuk Pemuda*. Jakarta. The Wahid Institute

Tandon, I., Wallace, C., Caretta, AM., Vij, S., Irvine, A. (2024). Urban water insecurity and its gendered impacts: on the gaps in climate change adaptation and Sustainable Development Goals. 16, 187–198. <https://doi.org/10.1080/17565529.2022.2051418>

World Meteorological Organization. 2021. *State of Climate Services Water*.

Sumber Lain:

<https://www.metrotvnews.com/read/b7WCRy2J-pemkot-makassar-tetapkan-tanggap-darurat-bencana-kekeringan> diakses pada tanggal 9 Juli 2024

<https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/01/09/rth-di-kota-makassar-terus-bertambah-dlh-target-2024-capai-12persen/#:~:text=Berdasarkan%20data%20dari%20Dinas%20Lingkungan,sebelumnya%20yakni%209%2C04%20persen.> diakses pada tanggal 14 Juli 2024

<https://dibi.bnbp.go.id/> diakses pada tanggal 14 Juli 2024

<https://makassar.kompas.com/read/2023/08/30/222946578/makassar-krisis-air-bersih-penyebabnya-bendungan-leko-pancing-maros-kering> diakses pada tanggal 16 Juli 2024

https://www.waterforpeople.org/climate/?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwNi0BhA1EiwAWZaANKnTkKuJ20FoBbEVHml2l_nk-X4NYhPkVO73OVqSpeDCMCwFz3J1dhoCiYYQAvD_BwE diakses pada tanggal 16 Juli 2024

<https://www.unwater-org.translate.goog/water-facts/water-and-gender?> diakses pada tanggal 19 Juli 2024

<https://www.worldbank.org/en/topic/waterresourcesmanagement> diakses pada tanggal 19 Juli 2024

<https://www.unwater.org/water-facts/water-and-climate-change> diakses pada tanggal 19 Juli 2024

<https://www.unwater.org/water-facts/water-and-climate-change> diakses pada tanggal 29 Juli 2024

<https://www.jentera.ac.id/kabar-dan-publikasi/publikasi/page/2> diakses pada tanggal 3 Agustus 2024

Yayasan Anak Bangsa Bisa. 2023. Makassar Je'ne Tallasa. (Online) <https://www.anakbangsabis.org/catalystlab/id/makassar> diakses pada tanggal 3 Agustus 2024

World Meteorological Organization. 2021. Wake Up to The Looming Water Crisis, Report Warns, <https://wmo.int/news/media-centre/wake-looming-water-crisis-report-warn> diakses pada tanggal 5 Agustus 2024

Suryandari Retno. 2022. Teknologi dan Krisis Air. Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada. <https://pslh.ugm.ac.id/teknologi-dan-krisis-air> diakses pada tanggal 5 Agustus 2024

Unicef. Water scarcity Addressing the growing lack of available water to meet children's needs. <https://www.unicef.org/wash/water-scarcity#> diakses pada tanggal 6 Agustus 2024

GALLERY

PERJUANGAN PEREMPUAN PESISIR UTARA KOTA MAKASSAR



KOTA DUNIA
KOTA BAHAGIA
KRISIS AIR

'Makassar: Kota Dunia yang Kr

20



Krisis Air

24



Diterbitkan oleh:

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan
Jalan Aroepala, Kompleks Permata Hijau Lestari, Blok Q1 No.8, Makassar Indonesia
+628229 393 9591
+62411 467 1368
walhisulsel@gmail.com
www.walhisulsel.or.id

Both ENDS
Nobelstraat 4
3512 EN Utrecht
The Netherlands
info@bothends.org